



**IMPLEMENTASI KONSEP *SUBSTANCE OVER FORM* PADA ASET
TETAP DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

ANTONIUS HARI SURYA DJARA

160810301110

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2022



**IMPLEMENTASI KONSEP *SUBSTANCE OVER FORM* PADA ASET
TETAP DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

ANTONIUS HARI SURYA DJARA

160810301110

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2022

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena Berkatnya skripsi ini dapat disusun sehingga dapat terselesaikannya dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua saya, Bapak Xaverius A. Djara (Alm) dan Ibu Maria Bian Pareira yang selalu mendukung, memotivasi, serta mendoakan saya dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
2. Kedua Kakak saya, Cici dan Anto Djara yang selalu mendengarkan keluh saya dan selalu memberikan semangat buat saya.
3. Adik saya Ivena Djara yang selalu memberikan semangat buat saya.
4. Semua teman-teman Paguyuban Flobamora Jember.
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

MOTTO

“Dirimu sungguh berharga karena tidak pernah ada orang yang sama seperti dirimu, baik di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.”

(Suster M. Fransita, FCh)

”If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello”

(Denzel Washington)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Antonius Hari Surya Djara

NIM : 160810301110

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Konsep *Substance Over Form* Pada Aset Tetap di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur” ini merupakan benar-benar hasil karya, pemikiran dan pemaparan saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya cantumkan sumbernya belum pernah diajukan pada intansi manapun atau telah dipublikasikan sebelumnya oleh orang lain. Apabila ditemukan terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dikemudian hari dalam pernyataan ini, saya bersedia mendapat sanksi akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Jember,.....
Yang menyatakan,

Antonius Hari Surya Djara
NIM 160810301110

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KONSEP *SUBSTANCE OVER FORM* PADA ASET
TETAP DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh

Antonius Hari Surya Djara

NIM 160810301110

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono S.E., MA. Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Konsep Substance Over Form Pada
Aset Tetap di Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Mahasiswa : Antonius Hari Surya Djara

NIM : 160810301110

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 08 Juni 2022

Yang Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono S.E., MA. Ak.
NIP. 760018023

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Dr. Agung Budi Sulistyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS.
NIP. 197809272001121002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

IMPLEMENTASI KONSEP *SUBSTANCE OVER FORM* PADA ASET TETAP DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Antonius Hari Surya Djara

NIM : 160810301110

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :.....

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleg gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : (.....)

Anggota 1 : (.....)

Anggota 2 : (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Prof. Dr. Isti Fadah, M. Si.
NIP. 1966102019900220001

*Implementasi Konsep Substance Over Form Pada Aset Tetap Di Sekretariat Dewan
Perwakilan*

Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2020

Antonius Hari Surya Djara

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Instansi pemerintahan harus mempunyai perencanaan yang dapat mencapai tujuan instansi baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Perencanaan program instansi pemerintah harus mempunyai informasi yang memadai agar dapat menunjang pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Informasi yang andal bisa ditemukan dalam laporan keuangan. laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan PSAP 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Konsep *Substance Over Form* pada laporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan teknik Triangulasi dengan Sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa imlementasi konsep *Substance Over Form* sudah sesuai dengan pernyataan PSAP 71 Tahun 2010 tentang pencatatan yang wajar. Dan juga Aset Tetap pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT sudah memiliki bukti legalitas atau bukti kepemilikan yang sah dan sudah terdaftar pada Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

Kata Kunci : *aset tetap, DPRD, Standar Akuntansi Pemerintah, Substance Over Form.*

*Implementation of the Concept of Substance Over Form on Fixed Assets Based at the
Secretarial of the Regional People's Representative
Council of East Nusa Tenggara Province for the Period 2020*

Antonius Hari Surya Djara

Department of Accountancy, Faculty of Economic, University of Jember

ABSTRACT

Government agencies must have a plan that can achieve the goals of agencies both long-term and short-term. Program planning of government agencies must have adequate information in order to support the implementation of these programs or activities. Reliable information can be found in financial statements. Government financial statements must be in accordance with PSAP 71 of 2010 which regulates the Standard of Accrual-Based Government Financial Statements. This research aims to find out the Implementation of the Substance Over Form Concept in the financial statements of the East Nusa Tenggara Provincial DPRD Secretariat whether it is in accordance with government regulation No. 71 of 2010, using a type of qualitative research with data analysis using triangulation techniques with sources. The results of this study showed that the extension of the concept of Substance Over Form was in accordance with psap71 of 2010 statement about reasonable recording. And also Fixed Assets at the Secretariat of the NTT Provincial Dprd already have proof of legality or proof of legal ownership and have been registered with the Accounting and Verification Section.

Keywords: *Fixed assets, Regional House of Representatives, Government Accounting Standart*

RINGKASAN

Implementasi Konsep *Substance Over Form* Pada Aset Tetap di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Antonius Hari Surya Djara, 160810301110; 2021; 56 halaman; Program Studi Strata Satu Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Aset tetap didefinisikan sebagai aset tetap Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dalam SAP nomor 71 Tahun 2010 terdapat PSAP 07 yang mengatur tentang Pengelolaan aset tetap, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai satuan kerja yang berkedudukan sebagai unsur penyelegara pemerintah daerah dan representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi pembentukan daerah, anggaran dan pengawasan. Dari semua fungsi DPRD membutuhkan aset tetap untuk menunjang oprasional dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat, pelaporan aset tetap khusus konsep *Substance Over Form* memerlukan pengelolaan yang tepat karena sangat rentan dalam hal pencatatan dan pelaporan tahunan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 71 tentang Akuntansi pemerintah berbasis Akruwal dan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. Peneliti memilih lokasi/objek penelitian ini karena Sekretariat DPRD Provinsi NTT mempunyai catatan permasalahan di tahun 2019, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pembukuan dan pertanggungjawaban serta pengujian fisik kas di bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Konsep *Substance Over Form* pada laporan Keuangan dan Pelaporan Aset tetap pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT sesuai dengan pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Akuntansi berbasis AkruaI dan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tahun 2010 tentang Aset Tetap. Permasalahan yang ditemukan peneliti dalam analisis data adalah bagian penggolongan aset tetap yaitu pada Peralatan dan mesin terdapat aset berupa Telepon dan Hotspot ke dalam aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.



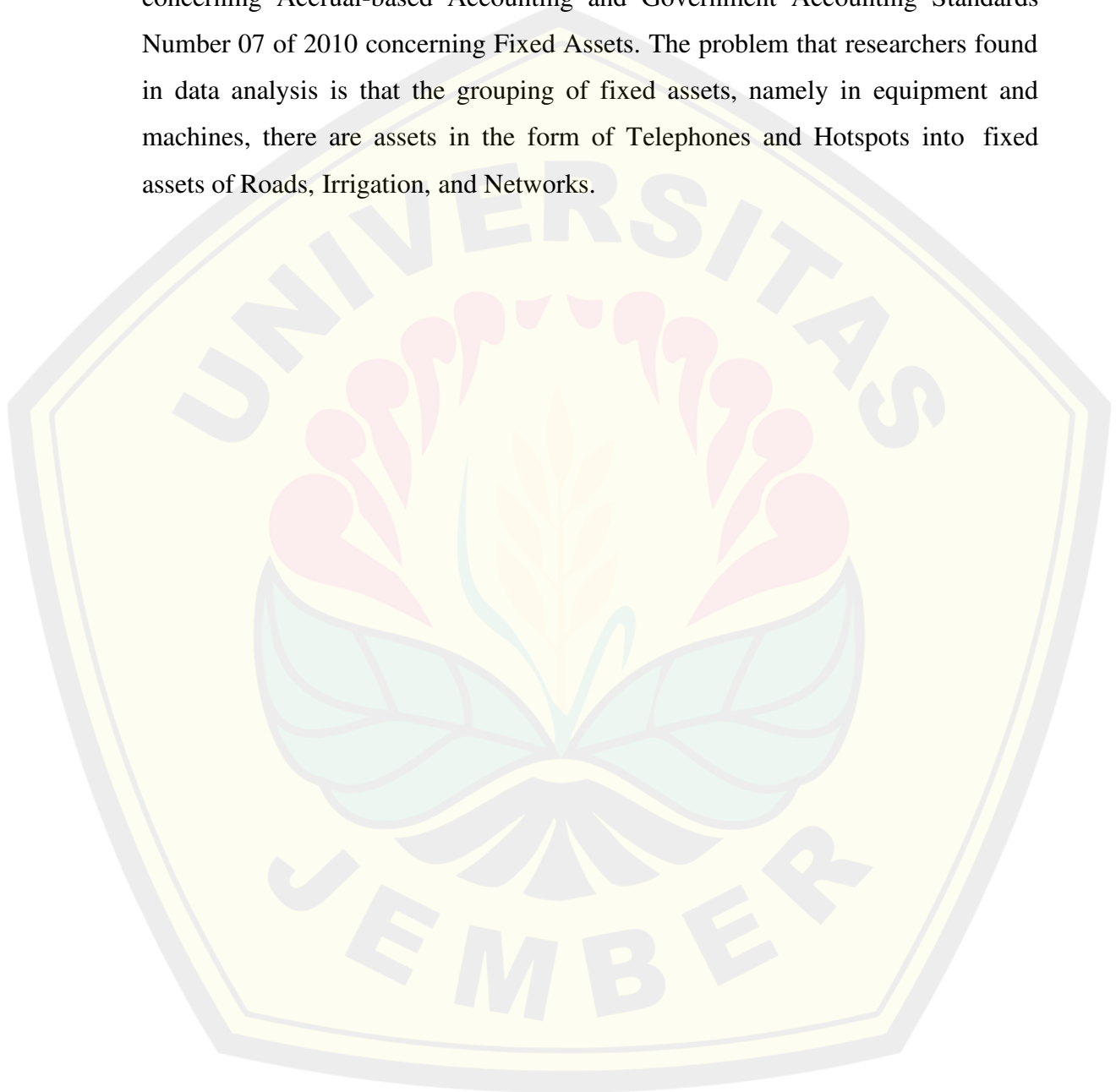
SUMMARY

Implementation of the Concept of Substance Over Form on Fixed Assets at the Secretariat of the Regional People's Representative Council of East Nusa Tenggara Province; Antonius Hari Surya Djara, 160810301110; 2021; 56 pages; Accounting Undergraduate Study Program; Faculty of Economics and Business, University of Jember.

Fixed assets are defined as tangible fixed assets that have a useful life of more than 12 (twelve) months for use in government activities or utilized for public interest. In SAP number 71 of 2010 there is PSAP 07 which regulates the management of fixed assets, the Secretariat of the Regional People's Representative Council of East Nusa Tenggara Province as a work unit domiciled as an element of organizing local government and people's representation, the DPRD has the function of regional formation, budget and supervision. Of all the functions of the DPRD requires fixed assets to support operations in providing services for the community, reporting fixed assets specifically the concept of Substance Over Form requires proper management because it is very vulnerable in terms of annual recording and reporting.

This research was conducted to determine the suitability of the fixed asset management of the Secretariat of the Regional Representative Council with Government Accounting Standards number 71 on Accrual-based government Accounting and Government Accounting Standards number 07 on fixed asset accounting. Researchers chose the location / object of this study because the Ntt Provincial DPRD Secretariat has a record of problems in 2019, based on the results of examination of bookkeeping and accountability documents and physical testing of cash at the expenditure treasurer at the NTT Provincial DPRD Secretariat.

The results of this study showed that the application of the Substance Over Form Concept in the Financial and Asset Reporting statements remained at the Secretariat of the NTT Provincial People's Representative Council in accordance with the statement of Government Accounting Standards Number 71 of 2010 concerning Accrual-based Accounting and Government Accounting Standards Number 07 of 2010 concerning Fixed Assets. The problem that researchers found in data analysis is that the grouping of fixed assets, namely in equipment and machines, there are assets in the form of Telephones and Hotspots into fixed assets of Roads, Irrigation, and Networks.



PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, berkat dan pertolongannya saya bisa menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Implementasi Konsep Substance Over Form Pada Aset Tetap di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berupa motivasi, dukungan, nasihat, saran, maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

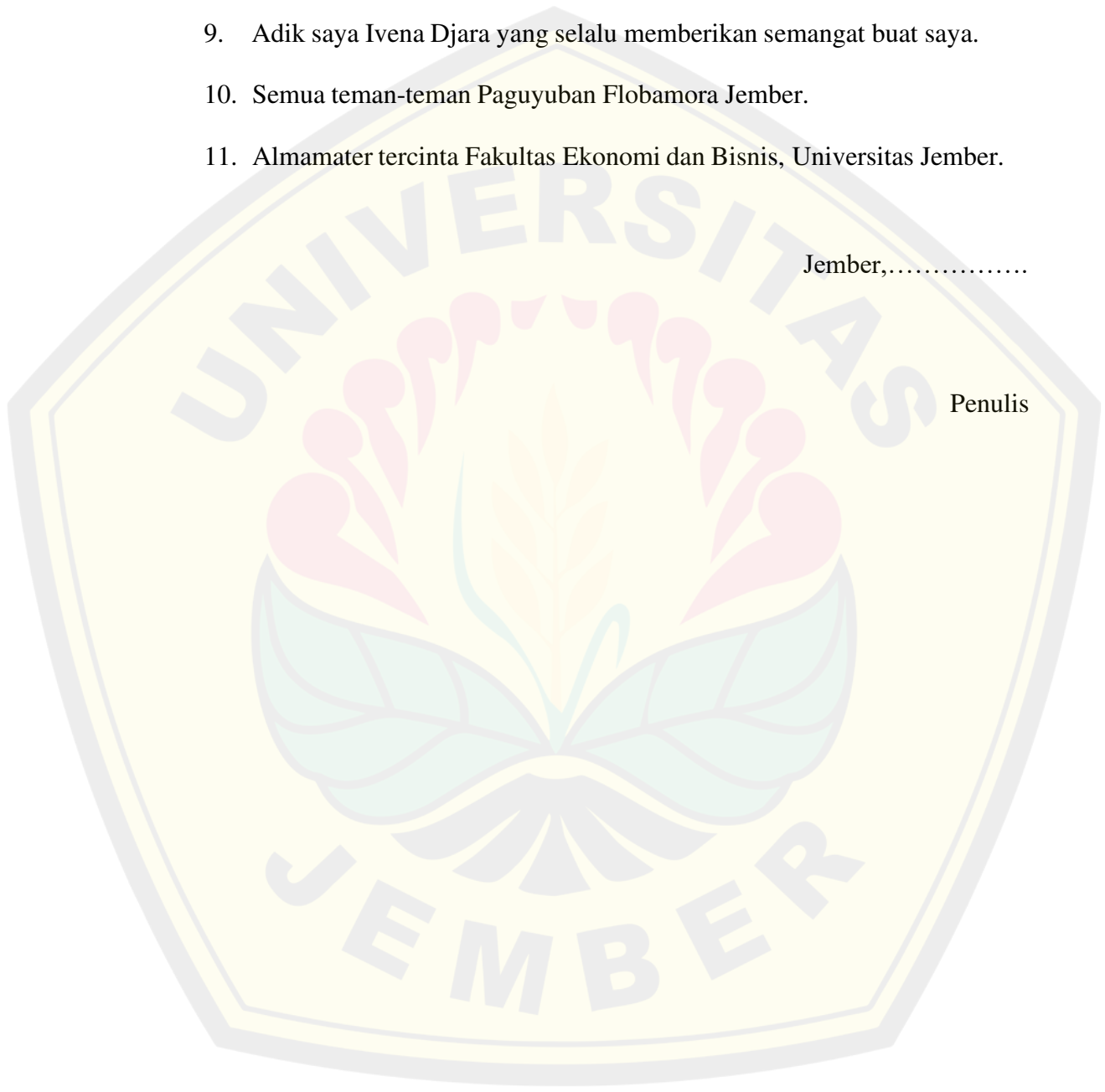
1. Ibu Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak, CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulisty, S.E., M.Si., Ak, CA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak, CA., selaku Dosen pembimbing Utama saya selama Mengerjakan dan menyelesaikan skripsi saya.
5. Ibu Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono S.E.,MA.Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang selama ini telah memberikan arahan dan membimbing saya sampai selesai.
6. Sekretariat DPRD Provinsi NTT yang sudah memberikan ijin serta data yang saya perlukan dalam penelitian ini serta Ibu ruvina, bapak Jeremias, dan ibu maria selaku informan yang sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
7. Kedua orangtua saya, Bapak Xaverius A. Djara (Alm) dan Ibu Maria

Bian Pareira yang selalu mendukung, memotivasi, serta mendoakan saya dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

8. Kedua Kakak saya, Cici dan Anto Djara yang selalu mendengarkan keluh saya dan selalu memberikan semangat buat saya.
9. Adik saya Ivena Djara yang selalu memberikan semangat buat saya.
10. Semua teman-teman Paguyuban Flobamora Jember.
11. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Jember,.....

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Teori.....	6
2.1.1 Konsep Substance Over Form	6
2.1.2 Aset	8
2.1.3 Aset Tetap	8
2.1.4 Klasifikasi Aset Tetap.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu.....	15
2.3 Kerangka Berpikir	17

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Objek Penelitian	18
3.3 Pendekatan Penelitian.....	19
3.4 Jenis dan Sumber Data	19
3.5 Teknik Analisis Data	20
3.6 Uji Kredibilitas Data.....	22
3.7 Kerangka Pemecah Masalah.....	24
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Provinsi.....	25
4.1.1 Kedudukan Sekretariat DPRD Prov. NTT	25
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Prov. NTT	27
4.1.3 Susunan Organisasi.....	28
4.1.4 Sumber Daya Aparatur	29
4.2 Pembahasan	30
4.2.1 Tanah	32
4.2.2 Peralatan dan Mesin.....	32
4.2.3 Gedung dan bangunan	34
4.2.4 Jalan listrik, dan jaringan.....	35
4.2.5 Aset Tetap Lainnya.....	36
4.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan.....	37
4.2.7 Substance Over Form	38
4.3 Matriks Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	39
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Keterbatasan	42
5.3 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
DAFTAR LAMPIRAN	45

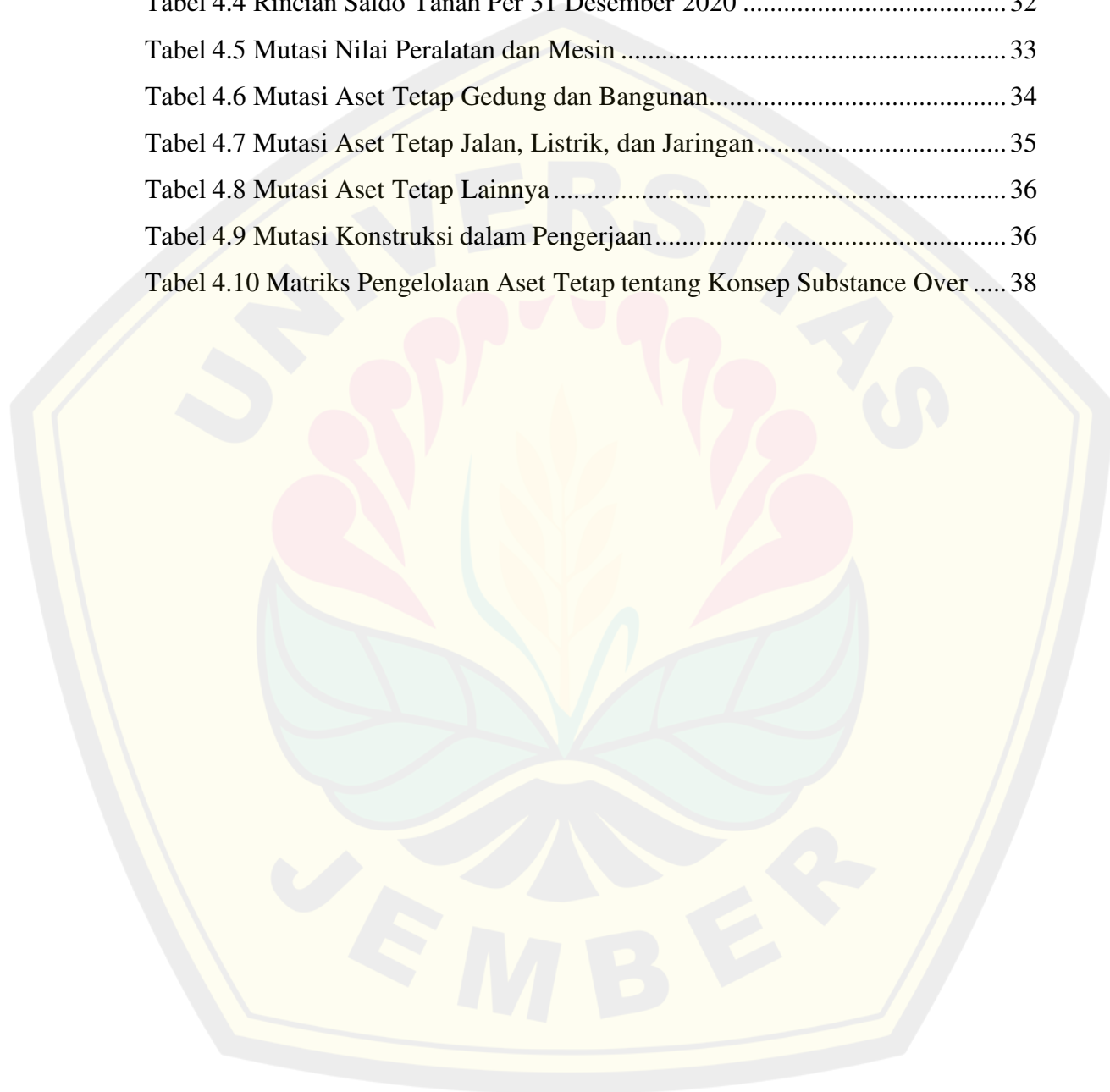
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	17
Gambar 2. Skema Teknik Analisis Data Kualitatif	21
Gambar 3. Kerangka Pemecah Masalah.....	24
Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretaris DPRD Provinsi NTT	28



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	19
Tabel 4.2 Sumber Daya Aparatur	29
Tabel 4.3 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2020	31
Tabel 4.4 Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2020	32
Tabel 4.5 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin	33
Tabel 4.6 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	34
Tabel 4.7 Mutasi Aset Tetap Jalan, Listrik, dan Jaringan.....	35
Tabel 4.8 Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	36
Tabel 4.9 Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan.....	36
Tabel 4.10 Matriks Pengelolaan Aset Tetap tentang Konsep Substance Over	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	44
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....	46
Lampiran 3. Daftar Aset Tetap.....	51



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi pemerintah harus mempunyai perencanaan yang dapat mencapai tujuan instansi baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Perencanaan program instansi pemerintah harus mempunyai informasi yang memadai agar dapat menunjang pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Informasi yang andal bisa ditemukan dalam laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mewajibkan untuk pemerintah daerah bisa segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagai tindak lanjut teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka Menteri Dalam Negeri Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Perubahan paradigma sistem pencatatan pada pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap entitas pemerintahan melaksanakan Standar Akuntansi yang berbasis akrual, kemudian Permendagri menerbitkan regulasi bagi pemerintah daerah yaitu Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Pada pasal 1 ayat (13) Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan laporan oprasional dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (16) Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Manfaat basis akrual secara nyata dirasakan dalam menyajikan informasi atas seluruh aktivitas yang terjadi. Memaparkan alasan penerapan basis akrual pada sektor pemerintahan, diantaranya yaitu akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya informasi tentang hutang dan piutang untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan, hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya, hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban, dan hanya akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas (Sari dan Putra, 2012: 4).

Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yaitu persiapan dalam perubahan budaya entitas pemerintah, pemilihan model implementasi, membutuhkan komunikasi, keahlian akuntansi, dan pemilihan IT Based System (sistem teknologi informasi). Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu jenis akuntansi yang sedang berkembang. Akuntansi

pemerintahan di Indonesia berkembang dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diubah dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

Dalam SAP No.71 tahun 2010 terdapat PSAP no. 07 yang mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan/organisasi. Pada instansi pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan dalam enam golongan yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Selain klasifikasi tersebut, ada beberapa klasifikasi untuk aset tetap berkarakteristik tertentu yaitu aset bersejarah, aset infrastruktur, dan aset militer.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang milik Negara, dan Nomor 5 tahun 2019, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

Pada SAP No.71 tahun 2010 *Substance over form* atau Substansi mengungguli bentuk dijelaskan sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Menurut Suwardjono (2011, 243) Substansi daripada bentuk dijelaskan sebagai konsep yang menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep ditingkat perekayasaan atau dalam menetapkan ditingkat penyusunan standar, akuntansi akan menegaskan makna atau substansi ekonomik suatu objek atau keajaiban dari pada makna yuridisnya? meskipun makna yuridis mungkin

menghendaki atau menyarankan perlakuan akuntansi yang berbeda, yang artinya Substansi daripada bentuk sebagai konsep yang menyatakan saat pengakuan aset tetap akan lebih dipercaya apabila terdapat bukti berita acara perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan legal secara hukum, misalnya Bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau setifikat tanah.

Aset Tetap berperan penting bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekretariat DPRD harus memperhatikan pemeliharaan aset tetapnya dengan baik supaya tidak mengecewakan masyarakat dalam melakukan kegiatan operasional dan juga bertanggung jawab kepada daerah atas dana APBD yang digunakan untuk pengembangan Sekretariat DPRD. Karena APBD bukanlah dana cuma - cuma yang dikucurkan daerah untuk instansi pemerintahan, tetapi dengan tujuan untuk memajukan dan membantu pendanaan dari instansi tersebut.

Dikutip dari berita Jawapos.com Terungkapnya kasus penyalahgunaan aset pemerintah Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020, terdapat kasus yang menjadi sorotan masyarakat yaitu kasus penjualan aset tanah milik pemerintah Kota Kupang seluas 19.468 meter persegi, berdasarkan penyelidikan dari Kejaksaan tinggi Nusa Tenggara Timur, 19 dari 40 sertifikat tanah telah berubah status menjadi hak milik perorangan. Sedangkan 21 sertifikat tanah lainnya, masih berstatus milik pemerintah Kota Kupang, kasus ini mencerminkan lemahnya laporan Keuangan pemerintah daerah dalam memperhatikan aset-aset milik pemerintah, sehingga risiko kecurangan tidak dapat dihindarkan.

1.2 Rumusan Masalah

Analisis implementasi Pengelolaan Aset Tetap pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengacu pada konsep *Substance Over Form*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta memberikan informasi mengenai Konsep *Substance Over Form* pada aset tetap dalam laporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan aset tetap dengan mengacu pada PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, acuan serta dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan penelitian selanjutnya mengenai Konsep *Substance Over Form*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran ataupun evaluasi akan pentingnya konsep *Substance Over Form* pada laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Konsep Substance Over Form

Secara bahasa, konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa yang konkret. Sejalan dengan makna tersebut, Suwardjono (2005: 19) menggambarkan konsep sebagai makna atau karakteristik yang berkaitan dengan kejadian, obyek, kondisi atau perilaku. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan disiplin akuntansi maka ada keterkaitan yang sangat erat antara pengembangan sebuah konsep akuntansi dengan fenomena dan realitas yang dihadapinya.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 *Substance over form* atau Substansi mengungguli bentuk sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan demikian Substansi mengungguli bentuk (*substance over form*) dikenal sebagai salah satu asumsi dasar dalam akuntansi keuangan. Pada laporan keuangan, substansi mencerminkan realitas dari transaksi atau peristiwa yang sesungguhnya terjadi sedangkan bentuk menunjukkan keadaannya ditinjau dari sudut hukum. Berkaitan dengan penyusunan standar, maka perikayasaan dan penetapan konsep akuntansinya lebih menekankan pada makna atau substansi ekonomis suatu kejadian daripada makna yuridisnya (Suwardjono, 2005: 243). Meyer (1976, 80) memperjelas konsep tersebut dengan menyodorkan sistem klasifikasi dua-dua (*a two-by-two classification system*) untuk menggambarkan dua dimensi dari konsep *substance over form*. Dimensi pertama adalah basis ekonomi dan dimensi yang kedua yaitu implementasi akuntansi. Basis ekonomi menjadi substansi dari sebuah transaksi sedangkan implementasi akuntansi yang berhubungan dengan proses pencatatan menjadi dasar dari sebuah bentuk (*form*).

Dengan dua dimensi tersebut, standar akuntansi yang ada telah memasukkan konsep *substance over form* sehingga diharapkan akan membantu akuntan dalam memecahkan masalah kontemporer dalam pelaporan keuangan. konsep *substance over form* seringkali didefinisi secara ambigu (bermakna mendua) dan membingungkan sebagaimana dalam pernyataannya berikut ini:

there is a shadowy nature to both the meaning and status of the concept and a confused and ambiguous nature in practice. Histories of the evolution of the concept of substance over form suggest that the precise words emerged in a confused and haphazard manner, reflecting the ebbs and flows of particular legislative initiatives and policy pronouncements (Rutherford, 1985; lihat juga Baker dan Hayes, 2004).

Substance over form diterjemahkan menjadi substansi mengungguli bentuk, diartikan “jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya” (Ikatan Akuntan Indonesia/IAI, 2002:paragraf 35).

Menurut Ong dan Spink (2004, 199) menjelaskan dalam konstruksi abstrak, substansi mengungguli bentuk formal menegaskan prinsip keadilan dan kewajaran atas ketentuan yang saling bertentangan dari *common law*, sehingga dapat membuat kontribusi penting untuk kelancaran keseluruhan system hukum. Ekuitas tradisional melihat substansi (*Substance*), bukan pada bentuk (*Form*) bertele-tele dari suatu transaksi. Dijelaskan pula bahwa substansi mengungguli bentuk formal berasal dari hukum tanah dan bila tidak terdapat kecurangan kesalahan, kekeliruan, atau penyembunyian sifat sebenarnya dari suatu transaksi, substansi mengungguli bebas dan sah.

Menurut Suwardjono (2011, 243) Substansi daripada bentuk dijelaskan sebagai konsep yang menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep ditingkat perikayasaan atau dalam menetapkan ditingkat penyusunan standar, akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomik suatu objek atau kejadian dari pada makna yuridisnya meskipun makna yuridis mungkin menghendaki atau menyarankan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Dengan kata lain, prinsip *Substance over form* atau substansi mengungguli bentuk formal memberi pedoman bagi penyusun laporan keuangan agar dapat menyajikan suatu informasi (akun) dengan wajar. Agar tujuan tersebut tercapai maka suatu transaksi atau peristiwa lain yang terkait harus dicatat dan disajikan berdasarkan aspek substansi (realitas ekonomi), bukan hanya berdasarkan aspek formalnya.

2.1.2 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Menurut PSAP 01 aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut FSAC No.6 prg 25 aset manfaat ekonomi masa depan kemungkinan diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian pada masa lalu.

2.1.3 Aset Tetap

Aset tetap menurut PSAP 07 paragraf 5-6 SAP PP 71 tahun 2010 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivisasi operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

1. Tanah;

2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya;
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Namun demikian, pada saat penerapan PSAP 07 oleh pemerintah, masih terdapat berbagai permasalahan, yaitu aset tetap yang dikuasai secara fisik namun bukti kepemilikannya tidak ada dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah, dan sebaliknya bagaimana dengan aset tetap yang memiliki bukti kepemilikan yang sah namun dikuasai oleh pihak lain. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu penjelasan lebih lanjut mengenai penyajian serta pengakuan aset tetap.

2.1.4 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut PSAP 07 SAP PP 71 tahun 2010 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut, antara lain:

1. Tanah

a. Definisi Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam PSAP 07 adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Klasifikasi Tanah

Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

1. Tanah untuk gedung dan bangunan
2. Tanah bukan untuk gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan.

Pengklasifikasian tanah ini bukan keharusan, tetapi tergantung pada kebutuhan rincian informasi yang diperlukan oleh entitas bersangkutan.

c. Pengakuan Tanah

PSAP 07 paragraf 15 menyatakan bahwa:

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintahan.

2. Peralatan dan Mesin

a. Definisi peralatan dan Mesin

Berdasarkan PSAP 07 paragraf 10, Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

b. Klasifikasi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga, dan rambu-rambu.

c. Pengakuan Peralatan dan Mesin

PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa:

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

3. Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

a. Definisi Gedung dan Bangunan

PSAP 07 Paragraf 9 menyatakan bahwa Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Klasifikasi Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monument/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi sebagai berikut:

1. Bangunan fisik
2. Taman, Jalan, dan Tempat Parkir, Pagar
3. Instalasi Listrik dan Generator
4. Instalasi AC
5. Lift
6. Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air Limbah
7. Saluran Telepon

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

a. Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

PSAP 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa: “jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.”

Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan

air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

b. Klasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Sesuai dengan kebutuhan entitas, aset tetap ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi misalnya jalan, jembatan, waduk, saluran irigasi, instalasi distribusi air, instalasi pembangkit listrik, instalasi distribusi listrik, saluran transmisi gas, instalasi distribusi gas, jaringan telepon, dan sebagainya. Klasifikasi yang tepat akan menyederhanakan penetapan kebijakan pemeliharaan/perawatan maupun kebijakan penyusutan aset bersangkutan

c. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, irigasi, dan jaringan maka dengan mengacu pada PSAP 07 Paragraf 11 Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bula, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi dan jaringan, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.

5. Aset Tetap Lainnya

a. Definisi Aset Tetap Lainnya

PSAP 07 Paragraf 12 menyatakan bahwa “Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.”

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset

Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Klasifikasi Aset Tetap Lainnya

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan atau buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantoryang bukan miliknya.

c. Pengakuan Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
2. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.

3. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 diatas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

b. Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sesuai dengan PSAP 08 Paragraf 6, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah Aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintah dan pelayan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga upah dan gaji yang dibayarkan dalam pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.

c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berdasarkan PSAP 08 Paragraf 14, suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Manfaatnya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Rizky Aditiya Nugraha (2017) melakukan penelitian dengan judul Menyelak Prinsip *Substance Over Form* Pada Transaksi dan Akuntansi Sukuk Negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan memperoleh hasil yang menyatakan bahwa implementasi *sukuk* negara di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan pada aspek kepatuhan syariah, diantaranya: (1) Keberadaan *Special Purpose Vehicle* (SPV) tidak merubah substansi akad. (2) Substansi akad yang dominan terjadi adalah utang-piutang. (3) Perjanjian *sale and purchase undertaking* menyebabkan akad mengandung jual beli *wafa'* yang tidak diperkenankan. (4) imbal hasil *sukuk* negara masih didasarkan pada nilai pokok dari investasi yang ditanamkan, dan belum terdapat standar akuntansi khusus yang mengatur tentang implementasi *sukuk* negara Indonesia.

Agung Budi Sulistiyo (2018) melakukan penelitian dengan judul Mengungkap Kompleksitas Masalah Pada Konsep *Substance over form*. Dan memperoleh hasil yang menyatakan bahwa definisi Konsep *Substance over form* meninggalkan ambiguitas makna dan penafsiran sehingga mendorong praktek akuntansi yang menyimpang bahkan menjadi modus untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*).

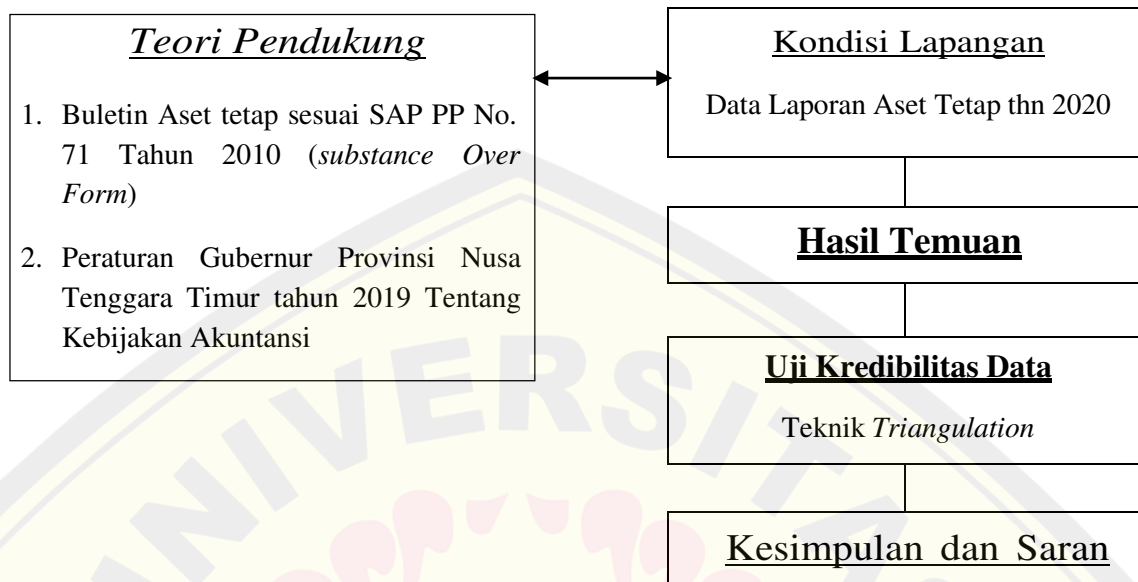
Maruli Harry Siregar (2015) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan Prinsip Akuntansi Mengungguli Bentuk Formal Pada Standar Akuntansi Pemerintah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Terhadap

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dan memperoleh hasil analisis yang menyatakan bahwa kurangnya kesamaan pendapat dalam penilaian pemeriksa, menunjukkan bahwa dalam pendekatan berbasis prinsip akuntansi dalam penetapan standar yang berasumsi bahwa pertimbangan profesional oleh pemeriksa adalah seragam atas setiap pemeriksaan merupakan hal yang sangat sulit untuk diterapkan. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.

Idham Yusandy (2018) melakukan penelitian dengan judul Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAP PP No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Periode 2017. Dan memperoleh hasil analisis yang menyatakan tidak adanya informasi dari BPKAD dan tidak adanya laporan keuangan dari dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten lumajang.

Salahudin (2018) melakukan penelitian dengan judul penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pemerintah daerah pada Kabupaten Maros. Dan memperoleh hasil analisis pemerintah Kabupaten Maros telah melaksanakan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi berbasis akrual.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1

Sumber : diolah penulis, 2021

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (Mc Millan dan Schumacher, 2012).

Effrein *et al.* (2010:25) Menyatakan pendekatan Interpretive merupakan suatu analisis sistematis yang mendalam terhadap tindakan yang bermakna sosial melalui observasi langsung secara mendetail dari manusia/objek studi pada setting alamiahnya, dalam rangka memperoleh pemahaman bagaimana suatu lingkungan sosial tercipta dan bekerja. Pada penelitian ini akan melakukan analisis secara mendalam terhadap Perlakuan Aset Tetap khususnya konsep *Substance Over Form* pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT dan menganalisis kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Sekretariat Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di jalan El tari, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, maka subjek dari penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan staf-staf bagian keuangan. Objek dari penelitian ini adalah evaluasi konsep *Substance over form* pada aset tetap di laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan non mainstream/kualitatif karena dengan pendekatan ini penelitian dapat mengeksplor hal-hal yang belum diketahui secara lebih mendalam sehingga dapat menjawab

pertanyaan penelitian yang diajukan dan cocok untuk penelitian yang tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020 yang meliputi Laporan Aset Tetap tahun 2020, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan data kualitatif yang digunakan berupa data gambaran umum, kebijakan akuntansi, dan peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan instansi serta literatur – literatur yang mendukung.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala bagian dan staff-staff bagian akuntansi dan administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan dengan dilakukan wawancara dan observasi lapangan.

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Lama Bekerja	Inisial
1	Ruvina M. Bethe, SE	Kasubag Verifikasi dan Akuntansi	4 Tahun	RB
2	Jeremias Abimetan, A.Md	Staf Bagian Aset Tetap	10 Tahun	JA
3	Dra. Maria Goreti Bian Pareira	Kasubag Persidangan dan Alat Kelengkapan Dewan	15 tahun	MP

Sumber: Diolah Penulis, 2021

Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data yang terkumpul tersebut kemudian dimanfaatkan oleh peneliti menurut kebutuhannya. Dalam hal ini data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum instansi
2. Struktur organisasi
3. Laporan daftar aset tetap yang dimiliki
4. Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi

3.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017:482) analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Miles and Huberman. Miles and Huberman, (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Pengumpulan data (data collaction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian data (data display)

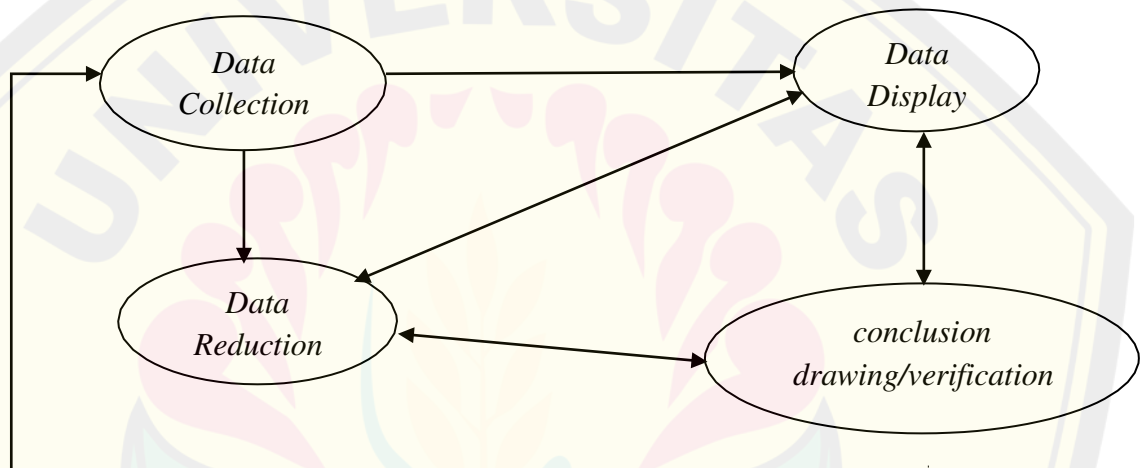
Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Conclusion drawing/verification

kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori

Gambar 3.2

Skema Teknik Analisis Data Kualitatif



Sumber: Sugiyono, 2018

3.6 Uji Kredibilitas Data

Hardani (2020) mengatakan Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang (responden) yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.

Agar hasil penelitian itu memperoleh hasil yang kredibilitas yang tinggi maka Lincon dan Guba (2008) merekomendasi tujuh teknik yang perlu dilakukan peneliti, salah satunya adalah triangulasi data, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data tersebut. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Triangulasi dengan Sumber

Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa kembali suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara membandingkan data hasil dengan data hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan melalui proses pengecekan informasi yang merupakan hasil penemuan pada saat penelitian yang menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Selain itu dilakukan pula pemeriksaan pada beberapa sumber data dengan cara yang sama yaitu dengan triangulasi metode.

3. Triangulasi dengan Penyidik

Teknik ini melibatkan pengamat di luar peneliti itu sendiri untuk memeriksa kembali keakuratan data yang diperoleh. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi tingkat ketidakakuratan data pada penelitian. Teknik triangulasi ini juga bisa dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian antar peneliti dengan obyek penelitian yang sama.

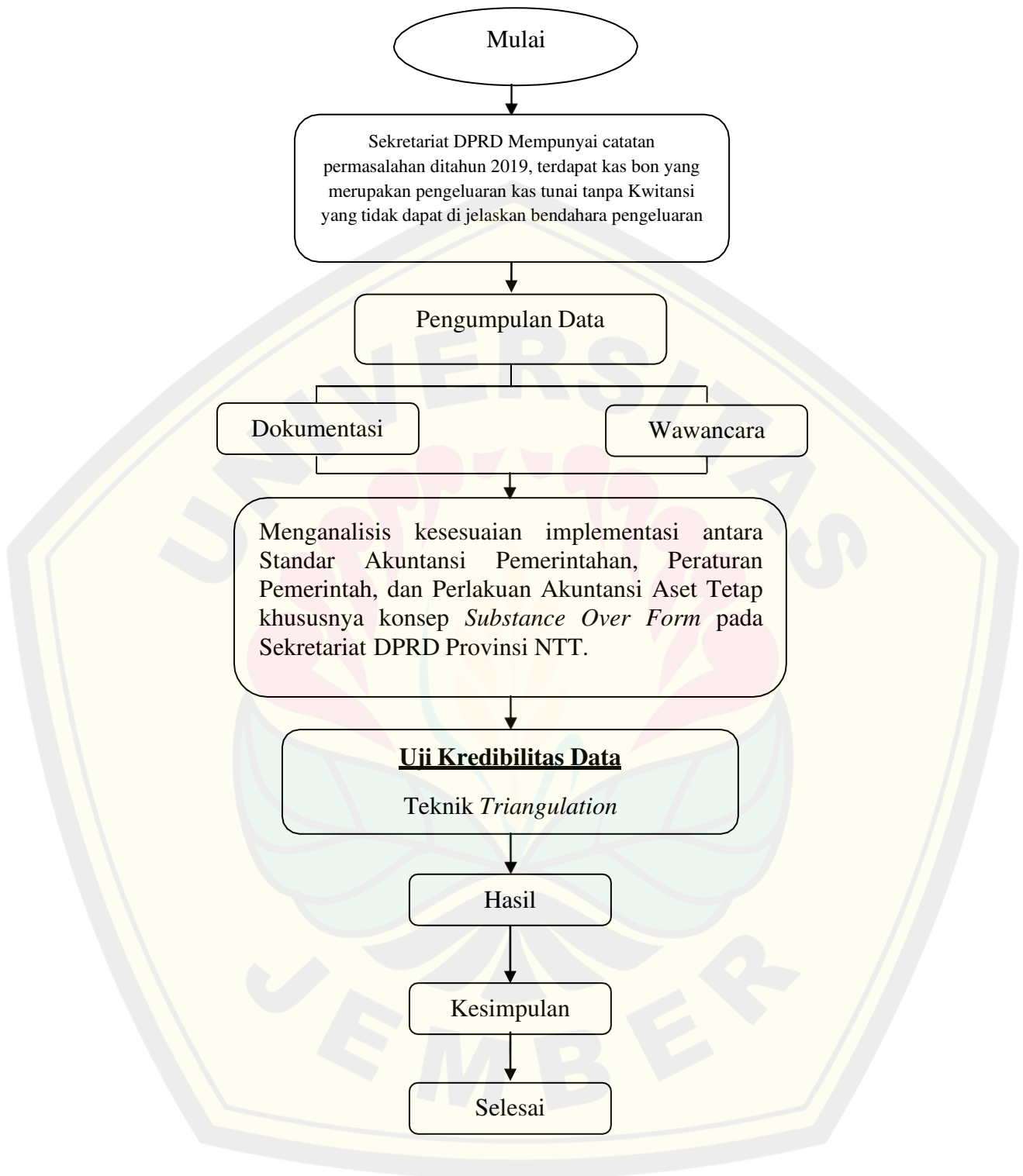
4. Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori menggunakan dasar berupa teori yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Pada saat fakta tidak dapat diperiksa kebenarannya dengan satu atau lebih teori, maka harus dicari penjelasan pembandingan yang dapat dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penelitian lainnya.

Triangulasi teori, yaitu membandingkan temuan yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi aset tetap dari segi pengakuan, penilaian dan pengungkapan dengan teori-teori yang relevan. Reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menetapkan prosedur fieldnote atau catatan lapangan dengan prosedur yang ditetapkan. Peneliti mencatat reliabilitas data ini pada lampiran catatan lapangan setelah melakukan wawancara terhadap informan yang bersangkutan.

Pada penelitian ini peneliti memilih teknik pemeriksaan data Triangulasi dengan sumber yang sesuai dengan data hasil dan informasi berupa hasil wawancara yang didapat peneliti dari objek penelitian.

3.7 Kerangka Pemecah Masalah



Gambar 3.3

Sumber : diolah penulis, 2021

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

4.1.1 Kedudukan Sekretariat DPRD Prov. NTT

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah ini, kedudukan kelembagaan Sekretariat DPRD sebagai aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD. Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTT adalah pelayanan administrasi kepada DPRD, maka sebelum menggambarkan tentang pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTT dipandang perlu menggambarkan sebatas tentang kelembagaan DPRD Provinsi NTT sebagai sebuah institusi politik yang memiliki prosedur administrasi yang spesifik.

1. Kelembagaan DPRD

DPRD Provinsi NTT sebagai lembaga Perwakilan rakyat daerah dan unsur penyelenggaraan pemerintah di daerah memiliki kedudukan dan peran serta fungsi yang sangat strategis. Ada tiga fungsi utama yakni fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, DPRD memiliki Alat Kelengkapan dan prosedur serta mekanisme kerja yang berbeda dengan birokrasi Pemerintah pada umumnya.

a. Alat Kelengkapan Dewan

Alat Kelengkapan Dewan terdiri dari :

1. Pimpinan DPRD
2. Komisi – Komisi DPRD
3. Badan Musyawara DPRD
4. Badan Anggaran DPRD
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD
6. Badan Kehormatan DPRD
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan

Secara khusus mengenai Secara khusus mengenai Komisi – komisi DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, yang terdiri dari ;

1. Komisi I, membidangi Pemerintahan
2. Komisi II, membidangi Perekonomian
3. Komisi III, membidangi Keuangan
4. Komisi IV, membidangi Pembangunan dan Infrastruktur
5. Komisi V, Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah keanggotaan DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 sebanyak 65 orang

b. Fraksi-fraksi DPRD

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan kekuatan Partai Politik yang mencerminkan partai politik hasil Pemilihan Umum. Jumlah fraksi DPRD hasil pemilu tahun 2019 ada 9 Fraksi yakni :

- | | |
|--|------------|
| 1. Fraksi PDI-P | : 10 Orang |
| 2. Fraksi Golkar | : 10 Orang |
| 3. Fraksi NasDem | : 9 Orang |
| 4. Fraksi PKB | : 7 Orang |
| 5. Fraksi PERINDO | : 6 Orang |
| 6. Fraksi GERINDRA | : 6 Orang |
| 7. Fraksi PAN | : 6 Orang |
| 8. Fraksi HANURA | : 5 Orang |
| 9. Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan | : 6 Orang |

Walaupun fraksi – fraksi DPRD bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, namun secara politik mempunyai peranan yang sangat strategis dalam melaksanakan fungsi *check and balance* terhadap penyelenggaran pemerintahan di daerah sekaligus mencerminkan adanya prinsip kemitraan sejajar antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Prov. NTT

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

a. Tugas Pokoknya adalah :

“Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi serta melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggara Sekretariat DPRD yang meliputi, administrasi umum, persidangan, dan alat kelengkapan, keuangan, kehumasan dan keprotokolan.”

b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTT mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan umum meliputi penyelenggaraan dan pemberian layanan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian dan Keanggotaan DPRD, Rumah Tangga dan Urusan Dalam dan Protokol dan Perjalanan untuk meningkatkan layanan administrasi dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana DPRD.
2. Merencanakan kegiatan Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah meliputi : Persidangan dan Alat Kelengkapan Dewan, Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi serta Humas dan Publikasi untuk meningkatkan layanan administrasi persidangan.
3. Merencanakan penyusunan Anggaran, pelaksanaan Administrasi keuangan, serta verifikasi dan Akuntansi untuk meningkatkan layanan keuangan kepada DPRD.

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu dari Perangkat Daerah Pemerintah yang mempunyai tugas untuk memberikan dukungan kepada DPRD, mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil (result) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yang dituangkan

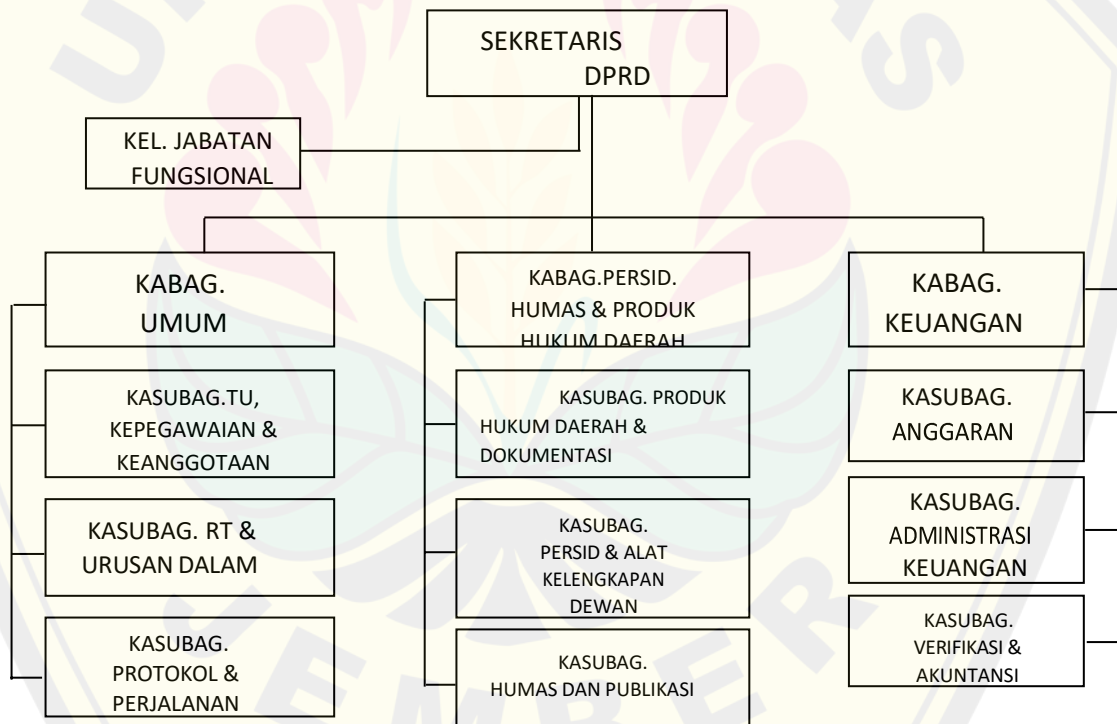
dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019 – 2024. Sedangkan kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD pada tahun 2024 dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

4.1.3 Susunan Organisasi

Sehubungan dengan kedudukan yang sangat strategis tersebut, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, diuraikan sebagai berikut :

Gambar 4.1

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Sumber : Diolah penulis, 2021

4.1.4 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya Aparatur diatas, diuraikan kedalam Jabatan – jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Non Struktural serta Tenaga Kontrak, sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sumber Daya Aparatur

<i>No</i>	<i>STATUS APARATUR</i>	<i>JUMLAH</i>	<i>ESELON</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A.	Pejabat Struktural		
	a. Sekretaris DPRD Provinsi NTT	1 orang	Eselon II-a
	b. Kepala Bagian	3 orang	Eselon III-a
	b. Kepala Sub Bagian	8 orang	Eselon IV-a
	<i>Jumlah Pejabat Struktural</i>	<i>12 orang</i>	
B.	Pejabat Fungsional		
	<i>Jumlah Pejabat Fungsional</i>	-	
C.	Pegawai Non Struktural	100 orang	
D.	C P N S	3 orang	
E.	Pegawai Kontrak	59 orang	
	<i>TOTAL APARATUR</i>	<i>174 orang</i>	

Sumber : Sekretariat DPRD Prov. NTT, 2019

4.2 Pembahasan

Aset tetap yang di miliki oleh Sekretariat DPRD Prov. NTT digunakan dalam pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan pengevaluasian serta pelaksanaan perumusan kebijakan-kebijakan. Aset tetap yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan akuntansi yang berlaku pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Peraturan ini mewajibkan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menggunakan akuntansi Berbasis Akrua yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual (*cash to accrual*).

Berdasarkan pernyataan informan penelitian Ibu Ruvina atau (RB) :
“Iya, jadi dasar akuntansi yang ‘kita’ gunakan sebagai pedoman Akuntan pada Sekretariat DPRD provinsi NTT itu adalah Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua”

pernyataan telah diubah ke dalam bahasa indonesia yang benar.

“Aset Tetap Sekretariat DPRD Provinsi NTT sudah memenuhi persyaratan dengan merujuk pada peraturan pemerintah pada tahun 2010 yang mengatur tentang Laporan Keuangan Pemerintahan(Wawancara: Januari 2022)

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dibenarkan pada pernyataan informan tentang Pelaporan aset tetap milik DPRD Provinsi NTT juga didukung oleh informan lain Bapak Jeremias atau (JA) dan Ibu Ruvina atau (RB):

“Kita sudah menerapkan sesuai Peraturan Pemerintah yang ditetapkan ditahun 2010 sejak bergantinya Peraturan Pemerintah tentang kas menuju akrual ke Berbasis Akrua” (Wawancara: Januari 2022)

Dari hasil wawancara dan pengelolaan data yang telah dilakukan oleh penulis terkait perlakuan akuntansi aset tetap pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT, menurut informan Ibu Ruvina atau (RB) tentang sejak kapan Penerapan konsep *Substance Over Form* pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT yaitu :

“Dalam peraturan pemerintah yang ditetapkan dalam pergub juga mewajibkan semua instansi dalam melakukan pencatatan wajib menerapkan peraturan pemerintah tahun 2010”

Pernyataan telah diubah dalam bahasa indonesia yang benar.

“Sekretariat DPRD Prov. NTT sudah menerapkan sesuai Peraturan pemerintah yang ditetapkan pada tahun 2010 dan semua peraturan yang menyangkut dengan laporan keuangan sudah diterapkan pada laporan keuangan Sekretariat DPRD Prov. NTT” (Wawancara: Januari 2022)

Berikut rincian Aset Tetap pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT Per 31 Desember 2020.

Tabel 4.3
Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2020

NO	Nama Akun	TA 2019	TA 2020	Akumulasi Penyusutan
1	Tanah	40.333.500.000	40.333.500.000	0
2	Peralatan dan Mesin	20.874.889.539,00	7.621.110.388,57	13.253.779.150,43
3	Gedung dan Bangunan	24.602.986.780,00	15.634.477.805,76	8.968.508.974,24
4	Jalan, Jembatan , dan jaringan	403.236.843,00	369.100.015,26	34.136.827,74
5	Aset Tetap Lainnya	119.112.000,00	109.112.00,00	10.000.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.589.000.000,00	1.589.000.000,00	0
Jumlah		64.537.995.033,39	65.656.300.209,59	22.266.424.952,41

Sumber : Diolah Penulis, 2021

4.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2020 dengan jumlah 5 bidang tanah beserta bangunan adalah sebesar Rp. 40.333.500.000.

Tabel 4.4

Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

NO	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	No. Sertifikat	Tahun Perolehan	Harga
1	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	446/B.483.7818	1980	37.950.000.000
2	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	465/B.483.7842	1980	703.500.000
3	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	466/B.483.7832	1980	500.000.000
4	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	BB.293881	1995	680.000.000
5	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	BB.293880	1995	500.000.000
Jumlah					40.333.500.000

Sumber : Diolah Penulis, 2022

Semua Aset tetap berupa tanah pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT sudah memiliki bukti legalitas yang sah berupa Sertifikat tanah dan sudah di data oleh bagian Akuntansi dan Verifikasi, bisa dilihat secara rinci pada Daftar Aset Tetap tahun 2020 pada Lampiran 3.

4.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 20.874.889.539,00 dan Rp. 7.621.110.388,57.

Tabel 4.5

Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2019	20.874.889.539,00
Mutasi Tambah	986.790.500,00
Jumlah	21.861.680.039,00
Mutasi Kurang	(15.950.000,00)
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	21.845.730.039,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	(15.623.112.978,29)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	6.222.617.060,71

Sumber : Diolah Penulis 2022

Nilai aset peralatan dan mesin tahun 2020 mengalami Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 15.623.112.978,29, dan pada tahun realisasi belanja modal dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada tahun 2020 sebesar Rp. 986.790.500,00 berupa pembelian Meja makan, AC, Lemari kayu, Lemari Arsip, Sofa dan Kursi tamu, Lemari es (Kulkas), Televisi, Generator Listrik, Laptop, Printer, Tempat tidur lengkap, dan Peralatan/Perlengkapan dapur dan Mutasi pengurangan sebesar Rp. 15.950.000,00 yang berupa aset Perlengkapan dapur. Menurut penjelasan informan Bapak Jeremias atau (JA) tentang penguasaan Aset Tetap dan Penanganan Aset Tetap yang hilang yaitu :

“jadi semua aset yang ada pada Sekretariat, kami dapat dari pengadaan APBD tiap tahunnya dan juga untuk penguasaan barang itu menjadi milik sekretariat di saat pejabat PPK menyerahkan daftar pengadaan barang dan ditanda tangani berita acara penyerahan barang sebagai bukti kepemilikan barang”

Pernyataan telah diubah dalam bahasa indonesia yang benar.

“Aset Tetap pada Sekretariat DPRD didapat dari pengadaan APBD tiap tahunnya dan penguasaan barang itu menjadi milik Sekretariat DPRD pada saat PPK atau Pejabat Pengadaan menyerahkan daftar pengadaan barang

ke bagian pendataan aset tetap, dan setelah itu pihak pendataan aset tetap menandatangani berita acara penyerahan barang sebagai bukti kepemilikan tanah; gedung dan bangunan; jalan, jembatan, dan jaringan. Sedangkan bukti kepemilikan untuk peralatan dan mesin yaitu bukti pembelian, barang tersebut resmi menjadi Aset Tetap milik Sekretariat DPRD” (Wawancara: Januari 2022).

“Apabila terjadi kehilangan pada aset tetap, maka staf bagian aset tetap harus melapor ke bagian Verifikasi dan Akuntansi, supaya bisa mendata barang yang hilang” (Wawancara: Januari 2022)

Dari pernyataan informan Bapak Jeremias atau (JA) tentang penerapan Konsep *Substance Over Form* bahwa *“Untuk Barang yang hilang, dihentikan, atau dihapus itu semua dilapor pada bagian Verifikasi dan Akuntansi agar dapat di data dan di masukan pada Catatan atas Laporan Keuangan”* (Wawancara: Januari 2022)

Semua Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sudah memiliki bukti legalitas yang sah yang memadai seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Kwitansi, dan Faktur sudah di data oleh bagian Akuntansi dan Verifikasi, bisa dilihat secara rinci pada Daftar Aset Tetap tahun 2020 pada Lampiran 3.

4.2.3 Gedung dan bangunan

Nilai perolehan Aset Tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 15.634.477.805,76.

Tabel 4.6

Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2020	15.634.477.805,76
Mutasi Tambah	743.969.200,00
Mutasi Kurang	0
Jumlah	16.378.447.005,76
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	15.634.477.805,76.
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	(9.460.568.709,84)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	15.886.387.270,16

Sumber: Diolah Penulis 2022.

Nilai Gedung dan Bangunan di tahun 2020 mengalami penyusutan sebesar Rp. 9.460.568.709,84 dan pada akhir periode 31 Desember 2020 nilai aset Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan senilai Rp. 743.969.200,00 yaitu berupa Renovasi gedung kantor, rumah jabatan I,II, dan III, dan gedung mess.

Semua Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sudah memiliki bukti legalitas yang sah yang memadai seperti Sertifikat dan Ijin Mendirikan Bangunan sudah di data oleh bagian Akuntansi dan Verifikasi, bisa dilihat secara rinci pada Daftar Aset Tetap tahun 2020 pada Lampiran 3.

4.2.4 Jalan listrik, dan jaringan

Nilai perolehan aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing Rp. 369.100.015,26 dan Rp. 403.236.843,00.

Tabel 4.7

Mutasi Aset Tetap Jalan, Listrik, dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2020	369.100.015,26
Mutasi Tambah	40.000.000,00
Mutasi Kurang	0
Jumlah	409.100.015,26
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	369.100.015,26
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	(45.858.140,48)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	397.378.702,62

Sumber: Diolah Penulis 2022

Nilai Jalan, listrik, dan Jaringan di tahun 2020 mengalami penyusutan sebesar Rp. 45.858.140,48 yang lebih besar dari tahun sebelumnya yang akumulasi di tahun 2019 sebesar Rp. 34.136.827,74 dan pada akhir periode per 31 Desember 2020 terdapat mutasi tambahan sebesar Rp. 40.000.000 yang merupakan Instalasi Pusat Pengatur Listrik kapasitas sedang pada Rumah jabatan Wakil ketua.

Semua Aset Tetap berupa Jalan, listrik, dan jaringan sudah memiliki bukti legalitas yang sah yang memadai seperti Kwitansi, Faktur, dan berita acara pengadaan sudah di data oleh bagian Akuntansi dan Verifikasi, bisa dilihat secara rinci pada Daftar Aset Tetap tahun 2020 pada Lampiran 3.

4.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 109.112.000,00.

Pada tahun 2020 nilai Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan jumlah saldo dari tahun 2019 dan 2020 adalah Rp.109.112.000,00 dan akumulasi penyusutan pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00 sama hal pada tahun 2019 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 10.000.000,00.

Tabel 4.8
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2020	109.112.000,00
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Jumlah	109.112.000,00
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	109.112.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	(10.000.000,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	109.112.000,00

Sumber: Diolah Penulis 2022

Semua Aset Tetap lainnya sudah memiliki bukti legalitas yang sah yang memadai seperti Kwitansi dan berita acara pengadaan sudah di data oleh bagian Akuntansi dan Verifikasi, bisa dilihat secara rinci pada Daftar Aset Tetap tahun 2020 pada Lampiran 3.

4.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset aset yang sedang dalam pengerjaan atau dalam perencanaan, nilai perolehan Konstruksi dalam Pengerjaan pada Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.589.000.000,00.

Tabel 4.9

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo per 31 Desember 2020	1.589.000.000,00
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Jumlah	1.589.000.000,00
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	1.589.000.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	1.589.000.000,00

Sumber : Diolah penulis 2022

Pada tahun 2020 nilai Konstruksi dalam pengerjaan tidak mengalami perubahan jumlah saldo dari tahun 2019 dan 2020 adalah Rp.1.589.000.000,00 dan akumulasi penyusutan pada tahun 2020 sebesar Rp. 0 sama hal pada tahun 2019 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 0. Karena masih dalam perencanaan dan belum adanya perubahan dalam perencanaan Gedung kantor.

4.2.7 Substance Over Form

Laporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi NTT sudah sesuai dengan peraturan pemerintah khususnya pada Konsep *Substance Over Form* atau Substansi mengungguli bentuk, yaitu lebih memperhatikan faktor ekonominya dibandingkan dengan aspek formalitasnya, Menurut pernyataan dari informan ibu Ruvina atau (RB) mengatakan bahwa :

“ Ya sudah, Mengenai pencatatan yang wajar sudah diaplikasikan dalam laporan keuangan dan sepenuhnya sudah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan”

Pernyataan telah diubah dalam Bahasa Indonesia yang benar.

“dalam hal konsep Substance over form atau yang biasa di sebut pencatatan dengan wajar sudah di aplikasikan dalam laporan keuangan Sekretariat DPRD dan sepenuhnya sudah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan milik Sekretariat DPRD memuat rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir tahun dimana terdapat penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan,dan perubahan nilai, dan untuk kendala yang dihadapi tidak ada ”

Menurut pernyataan dari bapak Jeremias atau (JA) tentang Aset Tetap yang ada atau dikuasai oleh Sekretariat DPRD mengatakan bahwa :

“semua aset yang digunakan sudah memiliki bukti kepemilikan yang sah, jadi untuk batasan hak milik itu tidak ada”

Pernyataan telah diubah dalam Bahasa Indonesia yang Benar

“semua Aset Tetap pada Sekretariat DPRD itu berasal dari pengadaan APBD jadi contoh seperti batasan hak milik itu tidak ada, semua Aset Tetap yang dipakai dan digunakan dalam operasional Sekretariat DPRD sudah terdaftar beserta kwitansi, sertifikat, maupun bukti legalitasnya semua pada Daftar Aset Tetap Sekretariat DPRD”

4.3 Matriks Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT

Untuk mempermudah dalam melihat kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap sekretariat DPRD Provinsi NTT dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.7 tentang Konsep Substance Over Form yang mengatur tentang Aset Tetap, dapat dilihat pada matriks berikut ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan.

Tabel 4.10

Matriks Pengelolaan Aset Tetap tentang konsep Substance Over Form Sekretariat DPRD Provinsi NTT

NO	Uraian			Kesesuaian	
	PSAP 07	NO	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Ya	Tidak
1	Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	1	Semua aset tetap yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTT berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya dinyatakan secara terpisah dan terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas.	✓	
2	Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah di terima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah	2	Aset tetap di akui pada saat transaksi terjadi, dan hak kepemilikan aset telah berpindah	✓	
3	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang	3	Laporan keuangan sekretariat DPRD Provinsi NTT mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang	✓	

	menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya.		menunjukkan pelepasan aset tetap lainnya selama periode tahun berjalan.		
4	Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap	4	Laporan Keuangan Sekretariat DPRD provinsi NTT sudah melakukan pengungkapan Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap	✓	
5	Laporan Keuangan Menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.	5	Sekretariat DPRD Provinsi NTT sudah melakukan pencatatan wajar pada laporan keuangan khususnya Catatan atas Laporan Keuangan.	✓	

Berdasarkan matriks diatas penerapan PSAP 07 tentang *Konsep Substance Over Form* pada laporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi NTT sudah sesuai dengan PSAP 07 dalam pengelolaan aset tetap Sekretariat DPRD, yaitu semua aset yang ada pada Sekretariat DPRD sudah dengan terperinci di ungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah membahas secara teoritis kemudian membandingkan dengan hasil penelitian yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

- A. Pengakuan informan Semua Aset Tetap yang dimiliki atau dikuasai Sekretariat DPRD Provinsi NTT sudah Memiliki Bukti yang memadai berupa Bukti kepemilikan dan kwitansi pembelian yang sudah terdata pada bagian Akuntansi dan Verifikasi.
- B. PSAP nomor 07 tentang konsep Substance Over Form sudah sesuai dengan penerapan di Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi NTT berupa semua Aset Tetap dinyatakan secara terperinci pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- C. Pengakuan kepemilikan Aset Tetap Sekretariat DPRD Provinsi NTT sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 yaitu ketika diterima atau diserahkan hak kepemilikan aset tetap dan ditandai dengan berita acara serah terima aset tetap ke pihak Sekretariat DPRD Provinsi NTT.
- D. Laporan Keuangan Sekretariat DPRD provinsi NTT sudah melakukan pengungkapan Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap.
- E. Laporan keuangan sekretariat DPRD Provinsi NTT mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan pelepasan aset tetaplainnya selama periode tahun berjalan.
- F. Pada pencatatan wajar yang di tetapkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 sudah diterapkan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT pada laporan keuangan khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah kurangnya narasumber wawancara, kurangnya data untuk kebutuhan validitas, tidak observasi langsung terhadap keberadaan aset tetap Sekretariat DPRD, tidak dilampirkannya Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi NTT tahun 2020 yang di periksa BPK, dan narasumber cenderung sangat berhati-hati dalam memberikan informasi dan data pada peneliti.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dirumuskan oleh peneliti maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melaksanakan wawancara dengan beberapa narasumber yang dapat memberrikan informasi yang dapat diperbandingkan, pengumpulan data tidak hanya bersumber pada Sekretariat DPRD tetapi juga bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kebutuhan validitas, pemeriksaan terhadap bukit kepemilikan aset tetap dan keberadaan aset tetap yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTT, peneliti harus melampirkan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi NTT yang telah di periksa BPK sehingga bisa melihat temuan-temuan yang dapat menambah informasi dalam penelitian.

Saran penulis bagi pihak Sekretariat DPRD Provinsi NTT adalah diharapkan dapat memindahkan aset tetap Peralatan dan mesin berupa telepon dan Hotspot ke dalam Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara Adventana, G. (2014). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah provinsi DIY dalam implementasi SAP berbasis akrual menurut PP No. 71 Tahun 2010* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. (2008). Metode penelitian akuntansi; mengungkap fenomena dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, R. A., & Zaky, A. (2017). Menyelak Prinsip *Substance over Form* pada Transaksi dan Akuntansi Sukuk Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Pemerintahan, Komite Standar Akuntansi. (2010). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 09*. Jakarta.
- Peraturan Gubernur Prov. Nusa Tenggara Timur, Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
- Riyanto, A. (2015). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta.
- Riyanto, S. E., Puji Agus, S. S. T., & Ak, M. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual: Dilengkapi dengan praktek dan simulasi*.
- Sampel, I. F., Kalangi, L., & Runtu, T. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).

Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71, Tahun 2010, Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

Sita, S. I., Andriana, A., & Irmadariyani, R. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 40-43.

Sulistiyo, A. B. (2014). Mengungkap Kompleksitas Masalah pada Konsep *Substance Over Form*. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 18(3), 293-310.

Sulistiyo, A. B. (2015). Simbolisasi Form (Kritik Atas Konsep *Substance Over Form* Melalui Perspektif Keseimbangan dalam Keadilan Ilahiyah. Prosiding Konferensi Regional Akuntansi (KRA) II.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Implementasi Konsep Substance Over Form Pada Aset Tetap Berdasarkan SAP PP No 71 Tahun 2010 Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2020” Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

Bagi Bagian Kasubag Verifikasi dan Akuntansi.

1. Apa dasar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Mulai kapan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan PP No.71 tahun 2010?
3. Apakah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTT sudah melakukan pencatatan yang wajar pada Laporan Keuangan? dan apakah sudah diterapkan juga pada Pelaporan Aset Tetap?
4. Apakah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mengimplementasi konsep *substance over form* pada laporan keuangan?
5. Bagaimana cara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani kasus seperti aset tetap yang tidak memiliki bukti formalitasnya?
6. Bagaimana cara menangani contoh kasus seperti terdapat Kas bon yang merupakan pengeluaran Kas tunai tanpa kwitansi?
7. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan PP No.71 tahun 2010 khususnya konsep *Substence over Form*?

Bagi Bagian Aset Tetap.

1. Bagaimana Tahapan Pengadaan Aset Tetap?
2. Apakah semua Aset tetap yang dikuasai oleh Sekretariat DPRD sudah memiliki bukti legalitas yang sah?
3. Bagaimana Proses tahapan aset tetap menjadi hak milik Sekretariat DPRD?
4. Apakah aset tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah?
5. Apakah aset tetap yang dimiliki Sekretariat DPRD sudah sepenuhnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan?
6. Apa langkah yang di ambil jika ada kehilangan atau mutasi Aset tetap?
7. Kendala apa yang pernah dihadapi dalam pengelolaan Aset Tetap?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Informan : Ruvina M. Bethe, SE (RB)

Jabatan : Kasubag Verifikasi dan Akuntansi

Tempat : Sekretariat DPRD Provinsi NTT

Hari/Tanggal : Senin, 21 Januari 2022

Waktu : 14.00

1. Apa dasar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?

“sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dasar akuntansi yang ‘kita’ gunakan sebagai pedoman Akuntan pada Sekretariat DPRD provinsi NTT itu adalah Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua”

Sudah di konversikan Berdasarkan Bahasa Indonesia Yang Baku.

“Aset tetap Sekretariat DPRD sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dasar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman Akuntan pada Sekretariat DPRD provinsi NTT itu adalah Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua”

2. Mulai kapan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan PP No.71 tahun 2010?

“Kita sudah menerapkan sesuai Peraturan Pemerintah yang ditetapkan ditahun 2010 sejak bergantinya Peraturan Pemerintah tentang kas menuju akrua ke Berbasis Akrua” (Wawancara: Januari 2022)Sudah di

3. Apakah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTT sudah melakukan pencatatan yang wajar pada Laporan Keuangan? dan apakah sudah diterapkan juga pada Pelaporan Aset Tetap?

“dalam peraturan pemerintah yang ditetapkan dalam pergub juga mewajibkan semua instansi dalam melakukan pencatatan wajib menerapkan peraturan pemerintah tahun 2010”

Sudah di konversikan Berdasarkan Bahasa Indonesia yang Baku.

“Sekretariat DPRD Prov. NTT sudah menerapkan sesuai Peraturan pemerintah yang ditetapkan pada tahun 2010 dan semua peraturan yang menyangkut dengan laporan keuangan sudah diterapkan pada laporan keuangan Sekretariat DPRD Prov. NTT”

4. Apakah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mengimplementasi konsep *substance over form* pada laporan keuangan?

“ Ya sudah, Mengenai pencatatan yang wajar sudah diaplikasikan dalam laporan keuangan dan sepenuhnya sudah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan”

Sudah di konversikan Berdasarkan Bahasa Indonesia yang Baku.

“dalam hal konsep Substance over form atau yang biasa di sebut pencatatan dengan wajar sudah di aplikasikan dalam laporan keuangan Sekretariat DPRD dan sepenuhnya sudah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan milik Sekretariat DPRD memuat rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir tahun dimana terdapat penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan,dan perubahan nilai, dan untuk kendala yang dihadapi tidak ada”

5. Bagaimana cara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani kasus seperti aset tetap yang tidak memiliki bukti formalitasnya?

“jadi, saat terjadi kehilangan pada Aset tetap, maka Beta harus lapor ke ibu ruvina supaya bisa di data barang apa saja yang hilang atau rusak”

Sudah di konversikan Berdasarkan Bahasa Indonesia yang Baku.

“Apabila terjadi kehilangan pada aset tetap, maka staf bagian aset tetap harus melapor ke bagian Verivikasi dan Akuntansi, supaya bisa mendata barang yang hilang”

6. Bagaimana cara menangani contoh kasus seperti terdapat Kas bon yang merupakan pengeluaran Kas tunai tanpa kwitansi?

“Untuk Kas Bon yang tidak mempunyai Kwitansi semua dimasukkan kedalam Catatan atas Laporan Keuangan”

Sudah di Konversikan Berdasarkan Bahasa Indonesia yang Baku.

“Kas Bon yang tidak mempunyai Kwitansi semua dimasukkan kedalam Catatan atas Laporan Keuangan”

7. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan PP No.71 tahun 2010 khususnya konsep *Substance over Form*?

“tidak ada kendala selama ini”

Sudah di konversikan Berdasarkan Bahasa Indonesia Yang Baku.

“untuk kendala yang dihadapi tidak ada”

8. Apakah pernah melakukan Kesalahan pada saat membuat laporan keuangan khususnya pada pelaporan Aset tetap?

“sonde ada adik”

Sudah di konversikan Berdasarkan Bahasa Indonesia Yang Baku.

“Untuk kesalahan pencatatan atau pelaporan sejauh ini tidak ada”



Informan : Jeremias Abimetan, A.Md (JA)

Jabatan : Staf Bagian Aset Tetap

Tempat : Sekretariat DPRD Provinsi NTT

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Januari 2022

Waktu : 15.30

1. Bagaimana Proses tahapan aset tetap menjadi hak milik Sekretariat DPRD?

“jadi semua aset yang ada pada Sekretariat, kami dapat dari pengadaan APBD tiap tahunnya dan juga untuk penguasaan barang itu menjadi milik sekretariat di saat pejabat PPK menyerahkan daftar pengadaan barang dan ditanda tangani berita acara penyerahan barang sebagai bukti kepemilikan barang”

Sudah dikonversikan berdasarkan Bahasa Indonesia yang Baku.

“Aset Tetap pada Sekretariat DPRD didapat dari pengadaan APBD tiap tahunnya dan penguasaan barang itu menjadi milik Sekretariat DPRD pada saat PPK atau Pejabat Pengadaan menyerahkan daftar pengadaan barang ke bagian pendataan aset tetap, dan setelah itu pihak pendataan aset tetap menandatangani berita acara penyerahan barang sebagai bukti kepemilikan tanah; gedung dan bangunan; jalan, jembatan, dan jaringan. Sedangkan bukti kepemilikan untuk peralatan dan mesin yaitu bukti pembelian, barang tersebut resmi menjadi Aset Tetap milik Sekretariat DPRD”

2. Apakah semua Aset tetap yang dikuasai oleh Sekretariat DPRD sudah memiliki bukti legalitas yang sah?

“semua aset yang digunakan sudah memiliki bukti kepemilikan yang sah, jadi untuk batasan hak milik itu tidak ada”

Sudah dikonversikan berdasarkan Bahasa Indonesia yang Baku.

“Aset Tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Sekretariat DPRD sudah memiliki bukti yang memadai dan semua sudah terdaftar pada bagian Akuntansi dan Verifikasi”

3. apakah aset tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah?

“iya, aset tetap diakui saat berita acara pengadaan barang di tanda tangani oleh bagian Aset tetap”

4. Apakah aset tetap yang dimiliki Sekretariat DPRD sudah sepenuhnya diungkapkan dalam laporan aset tetap?

“semua aset tetap yang ada pada Sekretariat sudah terdaftar dalam laporan, jika mutasi atau contoh kehilangan pasti bagian aset tetap melapor pada bagian verifikasi dan akuntansi”

5. Apa langkah yang di ambil jika ada kehilangan atau mutasi Aset tetap?

“Untuk Barang yang hilang, dihentikan, atau dihapus itu semua dilapor pada bagian Verifikasi dan Akuntansi agar dapat di data dan di masukan pada Catatan atas Laporan Keuangan”

6. Kendala apa yang pernah dihadapi dalam pengelolaan Aset Tetap?

“Untuk kendala tidak ada”



DAFTAR ASET TETAP
TAHUN 2020

Lampiran 3. Daftar Aset Tetap

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KAB/KOTA :
SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT

NO.	Urut.	Kode Barang	Reg.	RUMOR	SPESIFIKASI BARANG	Merk/Type	No. Sertifikat	No. Patrib	No. Chasis/Mesin	Asal/Cara Perolehan	Tahun Beli/Perolehan	Sat.	Kondisi (B,RR)	Jumlah awal		Masa Manfaat/Umur Ekonomis	Persentase Penyusutan Per Tahun	Per 31 Desember 2019			Per 31 Maret 2020							
														Barang	Harga (Rp)			Masa Manfaat yang sudah dilalui	Masa Manfaat	Sisa Masa Manfaat	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Saldo Awal	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Mutasi		Nilai Buku
																										Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
A. TANAH																												
1	1.3.1.01.01.04.001	0001		Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	Tanah Bangunan Ko	446/B.483.7818	APBD	1980	Bidang	B	1		37.950.000.000	-	0,00%	-	0	0	0	37.950.000.000	37.950.000.000	0	0	0	37.950.000.000			
2	1.3.1.01.01.01.002	0001		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Tanah Bangunan Ru	465/B.483.7842	APBD	1980	Bidang	B	1		703.500.000	-	0,00%	-	0	0	0	703.500.000	703.500.000	0	0	0	703.500.000			
3	1.3.1.01.01.01.002	0002		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Tanah Bangunan Ru	466/B.483.7832	APBD	1980	Bidang	B	1		500.000.000	-	0,00%	-	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	500.000.000			
4	1.3.1.01.01.01.002	0003		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Tanah Bangunan Ru	BB.293881	APBD	1995	Bidang	B	1		680.000.000	-	0,00%	-	0	0	0	680.000.000	680.000.000	0	0	0	680.000.000			
5	1.3.1.01.01.01.002	0004		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Tanah Bangunan Ru	BB.293880	APBD	1995	Bidang	B	1		500.000.000	-	0,00%	-	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	500.000.000			
Jumlah A														5	40.333.500.000	-	-	-	-	-	-	40.333.500.000	40.333.500.000	-	-	-	-	40.333.500.000
B. MESIN DAN PERALATAN																												
1	1.3.2.02.01.01.002	0001		Jeep	Toyota	MHFZK.69GX97014872	APBD	2009	Unit	B	1		379.090.000	-	7,14	24,29%	54.155.714	7	0	0	379.090.000	0	0	0	379.090.000			
2	1.3.2.02.01.01.002	0001		Jeep	Toyota	MHFZX.69G393006794	APBD	2009	Unit	B	1		331.818.000	-	7,14	24,29%	47.402.571	7	0	0	331.818.000	0	0	0	331.818.000			
3	1.3.2.02.01.01.002	0001		Jeep	Toyota	MHFZR.69G530006843	APBD	2009	Unit	B	1		331.818.000	-	7,14	24,29%	47.402.571	7	0	0	331.818.000	0	0	0	331.818.000			
4	1.3.2.02.01.01.002	0001		Jeep	Toyota	MHFZR.69G793007544	APBD	2009	Unit	B	1		331.818.000	-	7,14	24,29%	47.402.571	7	0	0	331.818.000	0	0	0	331.818.000			
6	1.3.2.02.01.02.003	0001		Miri Bus (Perumpung 14 Orang Kebawah)	Toyota	MHFEC2J2J40J18199	APBD	2010	Unit	B	1		193.400.000	-	7,14	24,29%	27.628.571	7	0	0	193.400.000	0	0	0	193.400.000			
8	1.3.2.02.01.02.003	0001		Miri Bus (Perumpung 14 Orang Kebawah)	Toyota	MHFVW.42G.67293799	APBD	2007	Unit	B	1		178.575.000	-	7,14	24,29%	25.510.714	7	0	0	178.575.000	0	0	0	178.575.000			
9	1.3.2.02.01.02.003	0001		Miri Bus (Perumpung 14 Orang Kebawah)	Toyota	MHFVW.42G66200909493	APBD	2006	Unit	B	1		139.900.000	-	7,14	24,29%	19.985.714	7	0	0	139.900.000	0	0	0	139.900.000			
10	1.3.2.02.01.02.003	0001		Miri Bus (Perumpung 14 Orang Kebawah)	Toyota	MHFVW42GX27099675	APBD	2007	Unit	B	1		178.575.000	-	7,14	24,29%	25.510.714	7	0	0	178.575.000	0	0	0	178.575.000			
11	1.3.2.02.01.01.001	0001		Sedan	Mitsubishi	MHMEASASNK.001898	APBD	2003	Unit	B	1		150.000.000	-	7,14	24,29%	21.428.571	7	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000			
12	1.3.2.02.01.02.001	0001		Bus (Perumpung 30 Orang Keatas)	Dyna Bus	MHFVU43A5016457	APBD	2010	Unit	B	1		414.000.000	-	7,14	24,29%	59.142.857	7	0	0	414.000.000	0	0	0	414.000.000			
13	1.3.2.02.01.01.003	0001		Station Wagon DH 96S AW	Toyota-Fortuner	MHF.2X69GCE7698956	APBD	2014	Unit	B	1		483.000.000	-	7,14	24,29%	68.000.000	5	2	345.000.000	138.000.000	0	0	0	138.000.000			
14	1.3.2.02.01.01.003	0002		Station Wagon DH 96A AW	Toyota-Fortuner	MHF.2X69GCE7698975	APBD	2014	Unit	B	1		483.000.000	-	7,14	24,29%	68.000.000	5	2	345.000.000	138.000.000	0	0	0	138.000.000			
15	1.3.2.02.01.01.003	0003		Station Wagon DH 96T AW	Toyota-Fortuner	MHF.2X69GCE7697935	APBD	2014	Unit	B	1		483.000.000	-	7,14	24,29%	68.000.000	5	2	345.000.000	138.000.000	0	0	0	138.000.000			
16	1.3.2.02.01.01.003	0004		Station Wagon DH 96W AW	Toyota-Fortuner	MHF.2X69GCE7698508	APBD	2014	Unit	B	1		483.000.000	-	7,14	24,29%	68.000.000	5	2	345.000.000	138.000.000	0	0	0	138.000.000			
17	1.3.2.02.01.01.003	0005		Station Wagon DH 97A AW	Toyota-Rush	MHF.E2CJ2J.EK.047840	APBD	2014	Unit	B	1		228.685.000	-	7,14	24,29%	32.689.286	5	2	163.346.429	65.338.571	0	0	0	65.338.571			
18	1.3.2.02.01.01.003	0006		Station Wagon DH 97W AW	Toyota-Rush	MHF.E2CJ2J.EK.047775	APBD	2014	Unit	B	1		228.685.000	-	7,14	24,29%	32.689.286	5	2	163.346.429	65.338.571	0	0	0	65.338.571			
19	1.3.2.02.01.01.003	0007		Station Wagon DH 97A AW / 76A AW	Toyota-Rush	MHF.E2CJ2J.EK.046851	APBD	2014	Unit	B	1		228.685.000	-	7,14	24,29%	32.689.286	5	2	163.346.429	65.338.571	0	0	0	65.338.571			
20	1.3.2.02.01.01.003	0008		Station Wagon DH 97B AW	Toyota-Rush	MHF.E2CJ2J.EK.043688	APBD	2014	Unit	B	1		228.685.000	-	7,14	24,29%	32.689.286	5	2	163.346.429	65.338.571	0	0	0	65.338.571			
21	1.3.2.02.01.01.003	0009		Station Wagon DH 97T AW	Toyota-Rush	MHF.E2CJ2J.EK.047586	APBD	2014	Unit	B	1		228.685.000	-	7,14	24,29%	32.689.286	5	2	163.346.429	65.338.571	0	0	0	65.338.571			
22	1.3.2.02.01.01.003	0001		Station Wagon Putih (DH 155 WA)	Toyota Innova E	MHFVW41G7F0065375	APBD	2015	Unit	B	1		289.500.000	-	7,14	24,29%	38.500.000	4	3	154.000.000	115.500.000	0	0	0	115.500.000			
23	1.3.2.02.01.01.003	0002		Station Wagon Hitam Metik (DH 148 WA)	Toyota Innova E	MHFVW41G7F0065148	APBD	2015	Unit	B	1		289.500.000	-	7,14	24,29%	38.500.000	4	3	154.000.000	115.500.000	0	0	0	115.500.000			
24	1.3.2.02.01.01.003	0003		Station Wagon Hitam Metik (DH 149 WA)	Toyota Innova E	MHFVW41G7F0065154	APBD	2015	Unit	B	1		289.500.000	-	7,14	24,29%	38.500.000	4	3	154.000.000	115.500.000	0	0	0	115.500.000			
25	1.3.2.02.01.01.003	0004		Station Wagon Hitam Metik (DH 146 WA)	Toyota Innova E	MHFVW41G7F0065139	APBD	2015	Unit	B	1		289.500.000	-	7,14	24,29%	38.500.000	4	3	154.000.000	115.500.000	0	0	0	115.500.000			
26	1.3.2.02.01.01.003	0005		Station Wagon Hitam Metik (DH 151 WA)	Toyota Innova E	MHFVW41G7F0065146	APBD	2015	Unit	B	1		289.500.000	-	7,14	24,29%	38.500.000	4	3	154.000.000	115.500.000	0	0	0	115.500.000			
27	1.3.2.02.01.01.003	0006		Station Wagon Hitam Metik (DH 142 WA)	Toyota Innova E	MHFVW41G7F00655272	APBD	2015	Unit	B	1		289.500.000	-	7,14	24,29%	38.500.000	4	3	154.000.000	115.500.000	0	0	0	115.500.000			
28	1.3.2.02.01.01.003	0007		Station Wagon Hitam Metik (DH 147 WA)	Toyota Innova E	MHFVW41G7F0065066	APBD	2015	Unit	B	1		289.500.000	-	7,14	24,29%	38.500.000	4	3	154.000.000	115.500.000	0	0	0	115.500.000			
29	1.3.2.02.01.01.003	0001		Station Wagon/Jeep/ Kendaraan Bermotor	TOYOTA FORTUNE	MHFGBG85.1K089415ZGDC530	APBD	2019	Unit	B	1		560.337.500	-	7,14	24,29%	80.048.214	0	7	0	560.337.500	560.337.500	0	0	0	560.337.500		
30	1.3.2.02.01.01.003	0002		Station Wagon/Jeep/ Kendaraan Bermotor	TOYOTA FORTUNE	MHFGBG85.1K089421ZGDC538	APBD	2019	Unit	B	1		560.337.500	-	7,14	24,29%	80.048.214	0	7	0	560.337.500	560.337.500	0	0	0	560.337.500		
31	1.3.2.02.01.01.003	0003		Station Wagon/Jeep/ Kendaraan Bermotor	TOYOTA FORTUNE	MHFGBG85.1K089502ZGDC548	APBD	2019	Unit	B	1		560.337.500	-	7,14	24,29%	80.048.214	0	7	0	560.337.500	560.337.500	0	0	0	560.337.500		
33	1.3.2.02.01.04.001	0001		Sepeda Motor	Honda	MHUB9116K567883	APBD	2008	Unit	B	1		16.363.636	-	7,14	24,29%	2.337.662	7	0	0	16.363.636	0	0	0	16.363.636			
34	1.3.2.02.01.04.001	0001		Sepeda Motor	Honda	MHUB9116K567885	APBD	2008	Unit	B	1		16.363.636	-	7,14	24,29%	2.337.662	7	0	0	16.363.636	0	0	0	16.363.636			
35	1.3.2.05.01.04.002	0001		Lemari Kayu	Lemari Asap Lokal	Lokal	APBD	2005	Buah	B	1		950.000	5	20,00%	190.000	5	0	0	950.000	0	0	0	950.000				
36	1.3.2.05.01.04.002	0002		Lemari Kayu	Lemari Asap Lokal	Lokal	APBD	2005	Buah	B	1		950.000	5	20,00%	190.000	5	0	0	950.000	0	0	0	950.000				
37	1.3.2.05.01.04.002	0003		Lemari Kayu	Lemari Asap Lokal	Lokal	APBD	2005	Buah	B	1		950.000	5	20,00%	190.000	5	0	0	950.000	0	0	0	950.000				
38	1.3.2.05.01.04.002	0004		Lemari Kayu	Lemari Asap Lokal	Lokal	APBD	2005	Buah	B	1		950.000	5	20,00%	190.000	5	0	0	950.000	0	0	0	950.000				
39	1.3.2.05.01.04.002	0007		Lemari Kayu	Lemari Asap Lokal	Lokal	APBD	2005	Buah	B																		

No.	Urut.	NUMOR		SPESIFIKASI BARANG		Merk/Type	No. Sertifikat	Asal/Cara	Tahun	Sat.	Kondisi	Jumlah awal		Masa manfaat	Perkiraan nilai penyusutan	Per 31 Desember 2019		Per 31 Maret 2020		Mutasi		Nilai Buku
		Kode Barang	Reg.	Nama/Jenis Barang	No. Pal / No. Chasis/Mesin							Barang	Pele.			Saldo	Saldo	Berambah	Berkurang			
347	02.06.02.04.04	0040	AC Split	Panasonic	Panasoni	APBD	2010	Buah	B	1	13.090.000	5	20,00%	2.818.000	0	0	13.090.000	0	0	0	0	13.090.000
348	02.06.02.04.03	0001	AC Split	Panasonic	Panasoni	APBD	2010	Buah	B	1	32.835.000	5	20,00%	6.567.000	0	0	32.835.000	0	0	0	0	32.835.000
349	02.06.02.04.03	0002	AC Split	Panasonic	Panasoni	APBD	2010	Buah	B	1	32.835.000	5	20,00%	6.567.000	0	0	32.835.000	0	0	0	0	32.835.000
350	02.06.02.04.03	0003	AC Split	Panasonic	Panasoni	APBD	2010	Buah	B	1	32.835.000	5	20,00%	6.567.000	0	0	32.835.000	0	0	0	0	32.835.000
351	02.06.03.01.05	0003	LUPS	Acer	Panasoni	APBD	2009	Buah	B	1	574.000	5	20,00%	114.800	0	0	574.000	0	0	0	0	574.000
352	02.06.03.01.05	0004	LUPS	Acer	Panasoni	APBD	2009	Buah	B	1	574.000	5	20,00%	114.800	0	0	574.000	0	0	0	0	574.000
353	02.06.03.01.05	0005	LUPS	Acer	Panasoni	APBD	2009	Buah	B	1	574.000	5	20,00%	114.800	0	0	574.000	0	0	0	0	574.000
354	02.06.03.01.05	0008	LUPS	Acer	Panasoni	APBD	2009	Buah	B	1	574.000	5	20,00%	114.800	0	0	574.000	0	0	0	0	574.000
355	02.06.03.01.05	0009	LUPS	Acer	Panasoni	APBD	2009	Buah	B	1	574.000	5	20,00%	114.800	0	0	574.000	0	0	0	0	574.000
356	02.06.03.01.05	0011	LUPS	Acer	Panasoni	APBD	2009	Buah	B	1	574.000	5	20,00%	114.800	0	0	574.000	0	0	0	0	574.000
357	02.06.03.01.05	0012	LUPS	Acer	Panasoni	APBD	2009	Buah	B	1	574.000	5	20,00%	114.800	0	0	574.000	0	0	0	0	574.000
358	02.06.03.01.05	0014	LUPS	Acer	Panasoni	APBD	2009	Buah	B	1	574.000	5	20,00%	114.800	0	0	574.000	0	0	0	0	574.000
359	02.06.03.01.05	0015	LUPS	Acer	Panasoni	APBD	2009	Buah	B	1	574.000	5	20,00%	114.800	0	0	574.000	0	0	0	0	574.000
360	02.06.03.01.05	0016	LUPS	Acer	Panasoni	APBD	2009	Buah	B	1	574.000	5	20,00%	114.800	0	0	574.000	0	0	0	0	574.000
361	02.06.02.06.03	0001	Televise	Sharp 42	36LD	APBD	2010	Buah	B	1	16.150.000	5	20,00%	3.230.000	0	0	16.150.000	0	0	0	0	16.150.000
362	02.06.02.06.03	0002	Televise	Sharp 42	36LD	APBD	2010	Buah	B	1	16.150.000	5	20,00%	3.230.000	0	0	16.150.000	0	0	0	0	16.150.000
363	02.06.02.06.03	0001	Televise	Sharp 29	32LD	APBD	2010	Buah	B	1	9.900.000	5	20,00%	1.980.000	0	0	9.900.000	0	0	0	0	9.900.000
364	02.06.02.06.03	0002	Televise	Sharp 29	32LD	APBD	2010	Buah	B	1	9.900.000	5	20,00%	1.980.000	0	0	9.900.000	0	0	0	0	9.900.000
365	02.06.02.05.09	0001	Tabung Gas Pemadam kbm	Gunebo m021x	m/021x	APBD	2008	Buah	B	1	2.490.000	5	20,00%	498.000	0	0	2.490.000	0	0	0	0	2.490.000
366	02.06.02.05.09	0002	Tabung Gas Pemadam kbm	Gunebo m021x	m/021x	APBD	2008	Buah	B	1	2.490.000	5	20,00%	498.000	0	0	2.490.000	0	0	0	0	2.490.000
367	02.06.02.05.09	0003	Tabung Gas Pemadam kbm	Gunebo m021x	m/021x	APBD	2008	Buah	B	1	2.490.000	5	20,00%	498.000	0	0	2.490.000	0	0	0	0	2.490.000
368	02.06.02.05.09	0009	Tabung Gas Pemadam kbm	Gunebo m021x	m/021x	APBD	2008	Buah	B	1	2.490.000	5	20,00%	498.000	0	0	2.490.000	0	0	0	0	2.490.000
369	02.06.02.05.09	0010	Tabung Gas Pemadam kbm	Gunebo m021x	m/021x	APBD	2008	Buah	B	1	2.490.000	5	20,00%	498.000	0	0	2.490.000	0	0	0	0	2.490.000
370	02.06.04.04.03	0001	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
371	02.06.04.04.03	0002	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
372	02.06.04.04.03	0003	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
373	02.06.04.04.03	0005	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
374	02.06.04.04.03	0008	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
375	02.06.04.04.03	0007	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
376	02.06.04.04.03	0008	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
377	02.06.04.04.03	0009	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
378	02.06.04.04.03	0010	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
379	02.06.04.04.03	0020	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
380	02.06.04.04.03	0021	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
381	02.06.04.04.03	0022	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
382	02.06.04.04.03	0023	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
383	02.06.04.04.03	0024	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
384	02.06.04.04.03	0028	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
385	02.06.04.04.03	0027	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
386	02.06.04.04.03	0028	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
387	02.06.04.04.03	0029	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
388	02.06.04.04.03	0030	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
389	02.06.04.04.03	0031	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
390	02.06.04.04.03	0042	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
391	02.06.04.04.03	0043	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
392	02.06.04.04.03	0044	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
393	02.06.04.04.03	0045	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
394	02.06.04.04.03	0048	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
395	02.06.04.04.03	0047	Kursi Kerja Anggata	Direktur Beroda	Beroda	APBD	2008	Buah	B	1	610.000	5	20,00%	122.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000
396	02.06.02.06.28	0001	Lambang Garuda	Lokal	Lokal	APBD	2008	Buah	B	1	697.365	5	20,00%	139.473	0	0	697.365	0	0	0	0	697.365
397	02.06.02.06.28	0002	Lambang Garuda	Lokal	Lokal	APBD	2008	Buah	B	1	697.365	5	20,00%	139.473	0	0	697.365	0	0	0	0	697.365
398	02.06.02.06.28	0003	Lambang Garuda	Lokal	Lokal	APBD	2008	Buah	B	1	697.365	5	20,00%	139.473	0	0	697.365	0	0	0	0	697.365
399	02.06.02.06.28	0004	Lambang Garuda	Lokal	Lokal	APBD	2008	Buah	B	1	697.365	5	20,00%	139.473	0	0	697.365	0	0	0	0	697.365

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara		Tahun	Sat.	Kondisi	Jumlah awal		Per 31 Desember 2019		Per 31 Maret 2020		Mutasi		Nilai Buku			
No.	Kode Barang	Reg.	Nama/Jenis Barang	Mark/Type	No. Sertifikat	Uraian	Barang	Pele.	Barang	Pele.	Saldo	Perubahan	Saldo	Perubahan	Berambah	Berkurang				
526	02.06.03.04.08	0002	Printer	Canon/tp 2770	IP	APBD	2013	Buah	B	1	1.500.000	4	25,00%	375.000	4	0	1.500.000	0	-	-
527	02.06.03.04.08	0003	Printer	Canon/tp 2770	IP	APBD	2013	Buah	B	1	1.500.000	4	25,00%	375.000	4	0	1.500.000	0	-	-
528	02.06.03.04.08	0004	Printer	Canon/tp 2770	IP	APBD	2013	Buah	B	1	1.500.000	4	25,00%	375.000	4	0	1.500.000	0	-	-
529	02.06.03.04.08	0005	Printer	Canon/tp 2770	IP	APBD	2013	Buah	B	1	1.500.000	4	25,00%	375.000	4	0	1.500.000	0	-	-
530	02.07.01.01.03	0001	Influkus	Sony GB 25	GB 25	APBD	2013	Buah	B	1	18.000.000	5	20,00%	3.600.000	5	0	18.000.000	0	-	-
531	02.06.04.07.99	0001	Lemari kaca sorok	Etalase Kaca	Etalase Kaca	APBD	2010	Buah	B	1	3.500.000	5	20,00%	700.000	5	0	3.500.000	0	-	-
532	02.06.04.07.99	0002	Lemari kaca sorok	Etalase Kaca	Etalase Kaca	APBD	2010	Buah	B	1	3.500.000	5	20,00%	700.000	5	0	3.500.000	0	-	-
533	02.06.02.06.23	0001	Kamera Digital	Table EOS kissx5	EOS kissx5	APBD	2013	Buah	B	1	29.500.000	5	20,00%	5.900.000	5	0	29.500.000	0	-	-
534	02.07.01.01.76	0001	Tape Rekaman	Sony	Sony	APBD	2013	Unit	B	1	1.000.000	5	20,00%	200.000	5	0	1.000.000	0	-	-
535	02.07.01.01.76	0002	Tape Rekaman	Sony	Sony	APBD	2013	Unit	B	1	1.000.000	5	20,00%	200.000	5	0	1.000.000	0	-	-
536	02.07.01.01.76	0003	Tape Rekaman	Sony	Sony	APBD	2013	Unit	B	1	1.000.000	5	20,00%	200.000	5	0	1.000.000	0	-	-
537	02.06.02.01.34	0001	Kurni Sola	Bigjen	Coklat	APBD	2013	set	B	1	14.900.000	5	20,00%	2.980.000	5	0	14.900.000	0	-	-
538	02.06.02.01.34	0002	Kurni Sola	Bigjen	Coklat	APBD	2013	set	B	1	14.900.000	5	20,00%	2.980.000	5	0	14.900.000	0	-	-
539	02.06.02.01.34	0003	Kurni Sola	Bigjen	Coklat	APBD	2013	set	B	1	14.900.000	5	20,00%	2.980.000	5	0	14.900.000	0	-	-
540	02.06.04.01.03	0001	Meja Rapat Anggota	Lokal Jali	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	5	0	2.500.000	0	-	-
541	02.06.04.01.03	0002	Meja Rapat Anggota	Lokal Jali	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	5	0	2.500.000	0	-	-
542	02.06.04.01.03	0003	Meja Rapat Anggota	Lokal Jali	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	5	0	2.500.000	0	-	-
543	02.06.04.01.03	0004	Meja Rapat Anggota	Lokal Jali	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	5	0	2.500.000	0	-	-
544	02.06.04.01.03	0005	Meja Rapat Anggota	Lokal Jali	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	5	0	2.500.000	0	-	-
545	02.06.04.01.03	0006	Meja Rapat Anggota	Lokal Jali	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	5	0	2.500.000	0	-	-
546	02.06.04.01.03	0007	Meja Rapat Anggota	Lokal Jali	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	5	0	2.500.000	0	-	-
547	02.06.04.01.03	0008	Meja Rapat Anggota	Lokal Jali	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	5	0	2.500.000	0	-	-
548	02.06.04.01.03	0009	Meja Rapat Anggota	Lokal Jali	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	5	0	2.500.000	0	-	-
549	02.06.04.01.03	0010	Meja Rapat Anggota	Lokal Jali	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	5	0	2.500.000	0	-	-
550	02.06.04.02.04	0001	Meja 1/2 Bro	Lokal	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
551	02.06.04.02.04	0002	Meja 1/2 Bro	Lokal	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
552	02.06.04.02.04	0003	Meja 1/2 bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
553	02.06.04.02.04	0004	Meja 1/2 bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
554	02.06.04.02.04	0005	Meja 1/2 bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
555	02.06.04.02.04	0006	Meja 1/2 Bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
556	02.06.04.02.04	0007	Meja 1/2 Bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
557	02.06.04.02.04	0008	Meja 1/2 bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
558	02.06.04.02.04	0009	Meja 1/2 bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
559	02.06.04.02.04	0010	Meja 1/2 bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
560	02.06.04.02.04	0011	Meja 1/2 bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
561	02.06.04.02.04	0012	Meja 1/2 bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
562	02.06.04.02.04	0013	Meja 1/2 Bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
563	02.06.04.02.04	0014	Meja 1/2 Bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
564	02.06.04.02.04	0015	Meja 1/2 bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
565	02.06.04.02.04	0016	Meja 1/2 bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
566	02.06.04.02.04	0017	Meja 1/2 bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
567	02.06.04.02.04	0018	Meja 1/2 Bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
568	02.06.04.02.04	0019	Meja 1/2 Bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
569	02.06.04.02.04	0020	Meja 1/2 Bro	Lokal 1/2 Bro	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.775.000	5	20,00%	355.000	5	0	1.775.000	0	-	-
570	02.06.01.04.02	0001	Rak besi	rakitan	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	5	0	1.500.000	0	-	-
571	02.06.01.04.02	0002	Rak besi	rakitan	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	5	0	1.500.000	0	-	-
572	02.06.01.04.02	0003	Rak besi	rakitan	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	5	0	1.500.000	0	-	-
573	02.06.01.04.02	0004	Rak besi	rakitan	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	5	0	1.500.000	0	-	-
574	02.06.02.04.04	0001	AC	Split	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	4.500.000	5	20,00%	900.000	5	0	4.500.000	0	-	-
575	02.06.02.04.04	0002	AC	Split	Lokal	APBD	2013	Unit	B	1	4.500.000	5	20,00%	900.000	5	0	4.500.000	0	-	-
576	02.06.02.05.05	0001	piring & gelas	Kaca	Kaca	APBD	2013	set	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	5	0	4.950.000	0	-	-
577	02.06.02.01.48	0001	Meja Biro + Kaca	Biro	Coklat	APBD	2011	Buah	B	1	2.000.000	5	20,00%	400.000	5	0	2.000.000	0	-	-
578	02.06.02.06.39	0001	Meja 1/2 Biro	1/2 Biro	Coklat	APBD	2011	Buah	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	5	0	1.500.000	0	-	-
580	02.06.02.01.54	0001	Lemari peralatan dapur	Lokal Jali	Lokal	APBD	2014	Unit	B	1	2.475.000	5	20,00%	495.000	5	0	2.475.000	0	-	-
581	02.06.02.01.54	0002	Lemari peralatan dapur	Lokal Jali	Lokal	APBD	2014	Unit	B	1	2.475.000	5	20,00%	495.000	5	0	2.475.000	0	-	-
582	02.06.02.01.54	0003	Lemari peralatan dapur	Lokal Jali	Lokal	APBD	2014	Unit	B	1	2.475.000	5	20,00%	495.000	5	0	2.475.000	0	-	-
583	02.06.02.01.54	0004	Lemari peralatan dapur	Lokal Jali	Lokal	APBD	2014	Unit	B	1	2.475.000	5	20,00%	495.000	5	0	2.475.000	0	-	-
584	02.06.02.01.01	0001	Lemari buku TV bwrk hitam	cina 200x200	Lokal	APBD	2014	Unit	B	1	6.000.000	5	20,00%	1.200.000	5	0	6.000.000	0	-	-
585	02.06.02.01.01	0002	Lemari buku TV bwrk hitam	cina 200x200	L															

No. Urut	Kode Barang	Reg.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikat M. Pa / No. Chasis/Mesin	Asal/Cara Barang	Tahun Pel.	Sat.	Kondisi	Jumlah awal	Masa Kadaluwarsa Ekonoms	Perkiraan Pembelian Per Tahun	Jumlah Per Tahun	Per 31 Desember 2019				Per 31 Maret 2020				Nilai Buku
														Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	
706	02.06.02.05.06	0002	Tabung Gas Elpiji	Elpiji	6.5kg	APBD	2014	Buah	B	1	750.000	5	20,00%	150.000	0	0	750.000	0	0	750.000	-	-
707	02.06.02.05.06	0003	Tabung Gas Elpiji	Elpiji	6.5kg	APBD	2014	Buah	B	1	750.000	5	20,00%	150.000	0	0	750.000	0	0	750.000	-	-
708	02.06.02.05.06	0004	Tabung Gas Elpiji	Elpiji	6.5kg	APBD	2014	Buah	B	1	750.000	5	20,00%	150.000	0	0	750.000	0	0	750.000	-	-
709	02.06.02.05.06	0005	Tabung Gas Elpiji	Elpiji	6.5kg	APBD	2014	Buah	B	1	750.000	5	20,00%	150.000	0	0	750.000	0	0	750.000	-	-
710	02.06.02.05.06	0006	Tabung Gas Elpiji	Elpiji	6.5kg	APBD	2014	Buah	B	1	750.000	5	20,00%	150.000	0	0	750.000	0	0	750.000	-	-
711	02.06.02.05.06	0007	Tabung Gas Elpiji	Elpiji	6.5kg	APBD	2014	Buah	B	1	750.000	5	20,00%	150.000	0	0	750.000	0	0	750.000	-	-
712	02.06.02.05.06	0008	Tabung Gas Elpiji	Elpiji	6.5kg	APBD	2014	Buah	B	1	750.000	5	20,00%	150.000	0	0	750.000	0	0	750.000	-	-
713	02.06.02.05.09	0001	Tabung gas pemadam	Gunebo	12 kg	APBD	2014	Buah	B	1	900.000	5	20,00%	180.000	0	0	900.000	0	0	900.000	-	-
714	02.06.02.05.09	0002	Tabung gas pemadam	Gunebo	12 kg	APBD	2014	Buah	B	1	900.000	5	20,00%	180.000	0	0	900.000	0	0	900.000	-	-
715	02.06.02.05.09	0003	Tabung gas pemadam	Gunebo	12 kg	APBD	2014	Buah	B	1	900.000	5	20,00%	180.000	0	0	900.000	0	0	900.000	-	-
716	02.06.02.05.09	0004	Tabung gas pemadam	Gunebo	12 kg	APBD	2014	Buah	B	1	900.000	5	20,00%	180.000	0	0	900.000	0	0	900.000	-	-
717	02.06.02.05.09	0005	Tabung gas pemadam	Gunebo	12 kg	APBD	2014	Buah	B	1	900.000	5	20,00%	180.000	0	0	900.000	0	0	900.000	-	-
718	02.06.02.05.09	0006	Tabung gas pemadam	Gunebo	12 kg	APBD	2014	Buah	B	1	900.000	5	20,00%	180.000	0	0	900.000	0	0	900.000	-	-
719	02.06.02.05.09	0007	Tabung gas pemadam	Gunebo	12 kg	APBD	2014	Buah	B	1	900.000	5	20,00%	180.000	0	0	900.000	0	0	900.000	-	-
720	02.06.02.05.06	0008	Tabung gas pemadam	Gunebo	12 kg	APBD	2014	Buah	B	1	900.000	5	20,00%	180.000	0	0	900.000	0	0	900.000	-	-
721	02.06.02.01.30	0001	Kursi putar	Direktur	Direktur	APBD	2014	Buah	B	1	3.000.000	5	20,00%	600.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	-	-
722	02.06.02.01.30	0002	Kursi putar	Direktur	Direktur	APBD	2014	Buah	B	1	3.000.000	5	20,00%	600.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	-	-
723	02.06.02.01.30	0003	Kursi putar	Direktur	Direktur	APBD	2014	Buah	B	1	3.000.000	5	20,00%	600.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	-	-
724	02.06.02.01.30	0004	Kursi putar	Direktur	Direktur	APBD	2014	Buah	B	1	3.000.000	5	20,00%	600.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	-	-
725	02.06.02.01.12	0001	Meja makan 6 kursi	Jati	Jati	APBD	2014	Unit	B	1	6.000.000	5	20,00%	1.200.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	-	-
726	02.06.02.01.12	0002	Meja makan 6 kursi	Jati	Jati	APBD	2014	Unit	B	1	6.000.000	5	20,00%	1.200.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	-	-
727	02.06.02.01.12	0003	Meja makan 6 kursi	Jati	Jati	APBD	2014	Unit	B	1	6.000.000	5	20,00%	1.200.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	-	-
728	02.06.02.01.12	0004	Meja makan 6 kursi	Jati	Jati	APBD	2014	Unit	B	1	6.000.000	5	20,00%	1.200.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	-	-
729	02.06.02.05.02	0001	Kompor Gas + regulator	Rina	2 tungku	APBD	2014	Buah	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	-	-
730	02.06.02.05.02	0002	Kompor Gas + regulator	Rina	2 tungku	APBD	2014	Buah	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	-	-
731	02.06.02.05.02	0003	Kompor Gas + regulator	Rina	2 tungku	APBD	2014	Buah	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	-	-
732	02.06.02.05.02	0004	Kompor Gas + regulator	Rina	2 tungku	APBD	2014	Buah	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	-	-
733	02.06.02.05.02	0005	Kompor Gas + regulator	Rina	2 tungku	APBD	2014	Buah	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	-	-
734	02.06.02.06.39	0001	Dispenser	Uchida	Tinggi	APBD	2014	Unit	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	-	-
735	02.06.02.06.39	0002	Dispenser	Uchida	Tinggi	APBD	2014	Unit	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	-	-
736	02.06.02.06.39	0003	Dispenser	Uchida	Tinggi	APBD	2014	Unit	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	-	-
737	02.06.02.06.39	0004	Dispenser	Uchida	Tinggi	APBD	2014	Unit	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	-	-
738	02.06.02.04.01	0001	Kulkas	Sharp	2 pintu	APBD	2014	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	-	-
739	02.06.02.04.01	0002	Kulkas	Sharp	2 pintu	APBD	2014	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	-	-
740	02.06.02.04.01	0003	Kulkas	Sharp	2 pintu	APBD	2014	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	-	-
741	02.06.02.04.01	0004	Kulkas	Sharp	2 pintu	APBD	2014	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	-	-
742	02.06.02.03.04	0001	Mesin cuci	LG	12 kg	APBD	2014	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	-	-
743	02.06.02.03.04	0002	Mesin cuci	LG	12 kg	APBD	2014	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	-	-
744	02.06.02.03.04	0003	Mesin cuci	LG	12 kg	APBD	2014	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	-	-
745	02.06.02.03.04	0004	Mesin cuci	LG	12 kg	APBD	2014	Unit	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	-	-
746	02.06.02.06.39	0001	meja tamu ruang Vip	Kaca	Kaca	APBD	2014	Buah	B	1	650.000	5	20,00%	130.000	0	0	650.000	0	0	650.000	-	-
747	02.06.02.06.39	0002	meja tamu ruang Vip	Kaca	Kaca	APBD	2014	Buah	B	1	650.000	5	20,00%	130.000	0	0	650.000	0	0	650.000	-	-
748	02.06.02.06.39	0003	meja tamu ruang Vip	Kaca	Kaca	APBD	2014	Buah	B	1	650.000	5	20,00%	130.000	0	0	650.000	0	0	650.000	-	-
749	02.06.02.06.39	0004	meja tamu ruang Vip	Kaca	Kaca	APBD	2014	Buah	B	1	650.000	5	20,00%	130.000	0	0	650.000	0	0	650.000	-	-
750	02.06.02.06.39	0005	meja tamu ruang Vip	Kaca	Kaca	APBD	2014	Buah	B	1	650.000	5	20,00%	130.000	0	0	650.000	0	0	650.000	-	-
751	02.07.01.01.76	0001	Tep rekorde	Sony	Kasete	APBD	2014	Buah	B	1	1.000.000	5	20,00%	200.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	-	-
752	02.07.01.01.76	0002	Tep rekorde	Sony	Kasete	APBD	2014	Buah	B	1	1.000.000	5	20,00%	200.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	-	-
753	02.07.01.01.76	0003	Tep rekorde	Sony	Kasete	APBD	2014	Buah	B	1	1.000.000	5	20,00%	200.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	-	-
754	02.07.01.01.76	0004	Tep rekorde	Sony	Kasete	APBD	2014	Buah	B	1	1.000.000	5	20,00%	200.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	-	-
755	02.07.01.01.03	0001	Inflokus	DECS6	DECS6	APBD	2014	Unit	B	1	15.000.000	5	20,00%	3.000.000	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	-	-
756	02.07.01.01.03	0002	Inflokus	DECS6	DECS6	APBD	2014	Unit	B	1	15.000.000	5	20,00%	3.000.000	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	-	-
757	02.06.03.02.02	0001	Komputer simbad	Simbad P4	Penium 4	APBD	2014	Unit	B	1	7.942.850	4	25,00%	1.985.713	4	0	7.942.850	0	0	7.942.850	-	-
758	02.06.03.02.02	0002	Komputer simbad	Simbad P4	Penium 4	APBD	2014	Unit	B	1	7.942.850	4	25,00%	1.985.713	4	0	7.942.850	0	0	7.942.850	-	-
759	02.06.03.02.02	0003	Komputer simbad	Simbad P4	Penium 4	APBD	2014	Unit	B	1	7.942.850	4	25,00%	1.985.713	4	0	7.942.850	0	0	7.942.850	-	-
760	02.06.03.02.02	0004	Komputer simbad	Simbad P4	Penium 4	APBD	2014	Unit	B	1	7.942.850	4	25,00%	1.985.713	4	0	7.942.850	0	0	7.942.850	-	-
761	02.06.03.02.02	0005	Komputer simbad	Simbad P4	Penium 4	APBD	2014	Unit	B	1	7.942.850	4	25,00%	1.985.713	4	0	7.942.850	0	0	7.942.850	-	-
762	02.06.03.02.02	0006	Komputer simbad	Simbad P4	Penium 4	APBD	2014	Unit	B	1	7.942.850	4	25,00%	1.985.713	4	0	7.942.850	0	0	7.942.850	-	-
763	02.06.03.02.02	0007	Komputer simbad	Simbad P4	Penium 4	APBD	2014	Unit	B	1	7.942.850	4	25,00%	1.985.713	4	0	7.942.850	0	0	7.942.850	-	-
764	02.06.03.02.02	0001	Leptop	Acer Intel Core	Intel Care	APBD	2014	Unit	B	1	11.850.000	4	25,00%	2.962.500	4	0	11.850.000	0	0	11.850.000	-	-
765	02.06.03.02.02	0002	Leptop	Acer Intel Core	Intel Care	APBD	2014	Unit	B	1	11.850.000	4	25,00%	2.962.500	4	0						

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara		Tahun		Sat.		Kondisi		Jumlah awal		Masa		Perencanaan		Pembelian		Per 31 Desember 2019		Per 31 Maret 2020		Mutasi		Nilai Buku			
NO.	Kode Barang	Reg.	Nama/Jenis Barang	Mark/Type	No. Sertifikat	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	
Urut.					No. Pal / No. Chasis/Mesin	Barang	Pele.	Barang	Pele.	Barang	Pele.	Barang	Pele.	Barang	Pele.	Barang	Pele.	Barang	Pele.	Barang	Pele.	Barang	Pele.	Barang	Pele.	Barang	Pele.	Barang	Pele.
1156	0015		Kursi rapel Ruang Ketua	Line	LINE	APBD	2015	Unit	B	1		850.000	5	20,00%	130.000					130.000		130.000		130.000		130.000		850.000	
1157	0001		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1158	0002		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1159	0003		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1160	0004		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1161	0005		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1162	0006		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1163	0007		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1164	0008		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1165	0001		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1166	0002		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1167	0003		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1168	0004		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1169	0005		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1170	0006		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1171	0007		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1172	0008		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1173	0009		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1174	0010		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1175	0011		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1176	0012		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1177	0013		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1178	0014		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1179	0015		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1180	0016		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1181	0017		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1182	0018		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1183	0019		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1184	0020		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1185	0021		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1186	0022		Printer	Canon Ip 2770	FINE	APBD	2015	Buah	B	1		1.385.000	4	25,00%	346.250					346.250		346.250		346.250		346.250		1.385.000	
1187	0001		Ups	CV3057	CV3057	APBD	2015	lusin	B	1		2.000.000	5	20,00%	400.000					400.000		400.000		400.000		400.000		2.000.000	
1188	0002		Ups	CV3057	CV3057	APBD	2015	lusin	B	1		2.000.000	5	20,00%	400.000					400.000		400.000		400.000		400.000		2.000.000	
1189	0003		Ups	CV3057	CV3057	APBD	2015	lusin	B	1		2.000.000	5	20,00%	400.000					400.000		400.000		400.000		400.000		2.000.000	
1190	0004		Ups	CV3057	CV3057	APBD	2015	lusin	B	1		2.000.000	5	20,00%	400.000					400.000		400.000		400.000		400.000		2.000.000	
1191	0001		Wireless Portabel	Label Profesional Sp	Label Profesional Sp	APBD	2015	Buah	B	1		11.000.000	5	20,00%	2.200.000					8.800.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000		11.000.000	
1192	0002		Wireless Portabel	Label Profesional Sp	Label Profesional Sp	APBD	2015	Buah	B	1		11.000.000	5	20,00%	2.200.000					8.800.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000		11.000.000	
1193	0001		Wireless Biasa	Label Profesional Sp	Label Profesional Sp	APBD	2015	Buah	B	1		7.500.000	5	20,00%	1.500.000					6.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		7.500.000	
1194	0002		Wireless Biasa	Label Profesional Sp	Label Profesional Sp	APBD	2015	Buah	B	1		7.500.000	5	20,00%	1.500.000					6.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		7.500.000	
1195	0001		Lemari 3 pintu	Lokal Jati	Jati	APBD	2015	Buah	B	1		4.500.000	5	20,00%	900.000					3.600.000		900.000		900.000		900.000		4.500.000	
1196	0001		Lemari 2 pintu	Lokal Jati	Jati	APBD	2015	Buah	B	1		4.500.000	5	20,00%	900.000					3.600.000		900.000		900.000		900.000		4.500.000	
1197	0001		Lemari TV 4 pintu	Lokal Jati	Jati	APBD	2015	Buah	B	1		6.000.000	5	20,00%	1.200.000					4.800.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		6.000.000	
1198	0001		Meja rapel Ruang pimpinan	Lokal Jati	Jati	APBD	2015	Unit	B	1		3.247.200	5	20,00%	649.440					2.597.760		649.440		649.440		649.440		3.247.200	
1199	0002		Meja rapel Ruang pimpinan	Lokal Jati	Jati	APBD	2015	Unit	B	1		3.247.200	5	20,00%	649.440					2.597.760		649.440		649.440		649.440		3.247.200	
1200	0003		Meja rapel Ruang pimpinan	Lokal Jati	Jati	APBD	2015	Unit	B	1		3.247.200	5	20,0															

NO. Urut.	Kode Barang	Reg.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikat M. Pa/j No.Chasis/Mesin	Asal/Cara Barang	Tahun Pel.	Sat.	Kondisi	Jumlah awal	Masa Kadaluwarsa Ekonoms	Perkiraan Pembelian Per Tahun	Per 31 Desember 2019					Per 31 Maret 2020					Mutasi		Nilai Buku				
													Yusuf	Per Tahun	Sal d	Per Tahun	Sal d	Per Tahun	Sal d	Per Tahun	Sal d	Per Tahun	Sal d	Per Tahun		Sal d	Berambah	Berkurang	
1426	0006	Laptop				APBD	2016	Unit	B	1	11.132.000	4	25,00%	2.783.000	3	1	8.349.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	11.132.000	-	-	-	-	-	-		
1427	0007	Laptop				APBD	2016	Unit	B	1	11.132.000	4	25,00%	2.783.000	3	1	8.349.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	11.132.000	-	-	-	-	-	-	-	
1428	0008	Laptop				APBD	2016	Unit	B	1	11.132.000	4	25,00%	2.783.000	3	1	8.349.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	11.132.000	-	-	-	-	-	-	-	
1429	0009	Laptop				APBD	2016	Unit	B	1	11.132.000	4	25,00%	2.783.000	3	1	8.349.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	11.132.000	-	-	-	-	-	-	-	
1430	0010	Laptop				APBD	2016	Unit	B	1	11.132.000	4	25,00%	2.783.000	3	1	8.349.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	11.132.000	-	-	-	-	-	-	-	
1431	0011	Laptop				APBD	2016	Unit	B	1	11.132.000	4	25,00%	2.783.000	3	1	8.349.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	11.132.000	-	-	-	-	-	-	-	
1432	0012	Laptop				APBD	2016	Unit	B	1	11.132.000	4	25,00%	2.783.000	3	1	8.349.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	11.132.000	-	-	-	-	-	-	-	
1433	0013	Laptop				APBD	2016	Unit	B	1	11.132.000	4	25,00%	2.783.000	3	1	8.349.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	11.132.000	-	-	-	-	-	-	-	
1434	0014	Laptop				APBD	2016	Unit	B	1	11.132.000	4	25,00%	2.783.000	3	1	8.349.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	11.132.000	-	-	-	-	-	-	-	
1435	0015	Laptop				APBD	2016	Unit	B	1	11.132.000	4	25,00%	2.783.000	3	1	8.349.000	2.783.000	2.783.000	2.783.000	11.132.000	-	-	-	-	-	-	-	
1436	0001	LCD/Projektor/Infocus				APBD	2016	Unit	B	1	24.970.000	5	20,00%	4.994.000	3	2	14.982.000	9.988.000	9.988.000	9.988.000	4.994.000	19.976.000	-	-	-	-	-	-	4.994.000.000
1437	0002	LCD/Projektor/Infocus				APBD	2016	Unit	B	1	24.970.000	5	20,00%	4.994.000	3	2	14.982.000	9.988.000	9.988.000	9.988.000	4.994.000	19.976.000	-	-	-	-	-	-	4.994.000.000
1438	0003	LCD/Projektor/Infocus				APBD	2016	Unit	B	1	24.970.000	5	20,00%	4.994.000	3	2	14.982.000	9.988.000	9.988.000	9.988.000	4.994.000	19.976.000	-	-	-	-	-	-	4.994.000.000
1439	0004	LCD/Projektor/Infocus				APBD	2016	Unit	B	1	24.970.000	5	20,00%	4.994.000	3	2	14.982.000	9.988.000	9.988.000	9.988.000	4.994.000	19.976.000	-	-	-	-	-	-	4.994.000.000
1440	0001	Komputer PC				APBD	2016	Unit	B	1	7.122.500	4	25,00%	1.780.625	3	1	5.341.875	1.780.625	1.780.625	1.780.625	7.122.500	-	-	-	-	-	-	-	
1441	0002	Komputer PC				APBD	2016	Unit	B	1	7.122.500	4	25,00%	1.780.625	3	1	5.341.875	1.780.625	1.780.625	1.780.625	7.122.500	-	-	-	-	-	-	-	
1442	0003	Komputer PC				APBD	2016	Unit	B	1	7.122.500	4	25,00%	1.780.625	3	1	5.341.875	1.780.625	1.780.625	1.780.625	7.122.500	-	-	-	-	-	-	-	
1443	0004	Komputer PC				APBD	2016	Unit	B	1	7.122.500	4	25,00%	1.780.625	3	1	5.341.875	1.780.625	1.780.625	1.780.625	7.122.500	-	-	-	-	-	-	-	
1444	0005	Komputer PC				APBD	2016	Unit	B	1	7.122.500	4	25,00%	1.780.625	3	1	5.341.875	1.780.625	1.780.625	1.780.625	7.122.500	-	-	-	-	-	-	-	
1445	0006	Komputer PC				APBD	2016	Unit	B	1	7.122.500	4	25,00%	1.780.625	3	1	5.341.875	1.780.625	1.780.625	1.780.625	7.122.500	-	-	-	-	-	-	-	
1446	0007	Komputer PC				APBD	2016	Unit	B	1	7.122.500	4	25,00%	1.780.625	3	1	5.341.875	1.780.625	1.780.625	1.780.625	7.122.500	-	-	-	-	-	-	-	
1447	0008	Komputer PC				APBD	2016	Unit	B	1	7.122.500	4	25,00%	1.780.625	3	1	5.341.875	1.780.625	1.780.625	1.780.625	7.122.500	-	-	-	-	-	-	-	
1448	0009	Komputer PC				APBD	2016	Unit	B	1	7.122.500	4	25,00%	1.780.625	3	1	5.341.875	1.780.625	1.780.625	1.780.625	7.122.500	-	-	-	-	-	-	-	
1449	0010	Komputer PC				APBD	2016	Unit	B	1	7.122.500	4	25,00%	1.780.625	3	1	5.341.875	1.780.625	1.780.625	1.780.625	7.122.500	-	-	-	-	-	-	-	
1450	0001	Lemari/Rak arsip/rak buku				APBD	2016	Unit	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	3	2	2.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	800.000	3.200.000	-	-	-	-	-	-	800.000.000
1451	0002	Lemari/Rak arsip/rak buku				APBD	2016	Unit	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	3	2	2.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	800.000	3.200.000	-	-	-	-	-	-	800.000.000
1452	0003	Lemari/Rak arsip/rak buku				APBD	2016	Unit	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	3	2	2.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	800.000	3.200.000	-	-	-	-	-	-	800.000.000
1453	0004	Lemari/Rak arsip/rak buku				APBD	2016	Unit	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	3	2	2.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	800.000	3.200.000	-	-	-	-	-	-	800.000.000
1454	0001	Bendera/Umbul-umbul				APBD	2016	Paket	B	1	10.350.000	5	20,00%	2.070.000	3	2	6.210.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000	8.280.000	-	-	-	-	-	-	2.070.000.000	
1455	0001	Monitor CCTV				APBD	2016	Paket	B	1	15.400.000	5	20,00%	3.080.000	3	2	9.240.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000	12.320.000	-	-	-	-	-	-	3.080.000.000	
1456	0001	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1457	0002	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1458	0003	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1459	0004	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1460	0005	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1461	0006	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1462	0007	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1463	0008	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1464	0009	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1465	0010	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1466	0011	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1467	0012	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1468	0013	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1469	0014	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1470	0015	CCTV				APBD	2016	Unit	B	1	4.950.000	5	20,00%	990.000	3	2	2.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000	-	-	-	-	-	-	990.000.000	
1471	0001	Souf System				APBD	2016	Paket	B	1	197.450.000	5	20,00%	39.490.000	3	2	118.470.000	78.980.000	78.980.000	78.980.000	39.490.000	157.960.000	-	-	-	-	-	-	39.490.000.000
1472	0001	Perekam Suara Digital				APBD	2016	Unit	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	3	2	900.000	600.000	600.000	600.000	300.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	300.000.000
1473	0002	Perekam Suara Digital				APBD	2016	Unit	B	1	1.500.000	5	20,00%	300.000	3	2	900.000	600.000	600.000	600.000	300.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	300.000.000
1474	0003	Perekam Suara Digital				APBD	2016	Unit	B	1	1.5																		

No. Urut	Kode Barang	Reg.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikat M. Pal. / No. Chasis/Mesin	Asal/Cara Barang	Tahun Pel.	Sat.	Kondisi	Jumlah awal	Masa lama/le masa ekonomis	Perkiraan P. y. n. a. n. P. l. y. n. a. n. P. r. t. h. u. i.	Yusufa Per Tahun	Mutasi Berambah Berkurang	Per 31 Desember 2019				Per 31 Maret 2020				Nilai Buku	
															Sald	Salut	Salut	Salut	Sald	Salut	Salut	Salut		
2343	0012		Cangkr sampo	Sampo		APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2352	0001		Yeko Set. Cangkrkeramik			APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2353	0002		Yeko Set. Cangkrkeramik			APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2354	0003		Yeko Set. Cangkrkeramik			APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2355	0004		Yeko Set. Cangkrkeramik			APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2356	0005		Yeko Set. Cangkrkeramik			APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2357	0006		Yeko Set. Cangkrkeramik			APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2358	0007		Yeko Set. Cangkrkeramik			APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2359	0008		Yeko Set. Cangkrkeramik			APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2360	0009		Yeko Set. Cangkrkeramik			APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2361	0010		Yeko Set. Cangkrkeramik			APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2362	0011		Yeko Set. Cangkrkeramik			APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2363	0012		Yeko Set. Cangkrkeramik			APBD	2019	Set	B	1	550.000	5	20,00%	110.000	0	5	0	550.000	550.000	110.000	110.000	-	-	440.000,00
2362	0001		Kuklas Ruang Kerja Pimpnanan			APBD	2019	Buah	B	1	4.975.000	5	20,00%	995.000	0	5	0	4.975.000	4.975.000	995.000	995.000	-	-	3.980.000,00
2393	0002		Kuklas Ruang Kerja Pimpnanan			APBD	2019	Buah	B	1	4.975.000	5	20,00%	995.000	0	5	0	4.975.000	4.975.000	995.000	995.000	-	-	3.980.000,00
2394	0003		Kuklas Ruang Kerja Pimpnanan			APBD	2019	Buah	B	1	4.975.000	5	20,00%	995.000	0	5	0	4.975.000	4.975.000	995.000	995.000	-	-	3.980.000,00
2395	0004		Kuklas Ruang Kerja Pimpnanan			APBD	2019	Buah	B	1	4.975.000	5	20,00%	995.000	0	5	0	4.975.000	4.975.000	995.000	995.000	-	-	3.980.000,00
2396	0001		Tral-Gorden France			APBD	2019	Paket	B	1	89.250.000	5	20,00%	19.280.000	0	5	0	89.250.000	89.250.000	19.280.000	19.280.000	-	-	70.000.000,00
2397	0001		Televi			APBD	2019	Buah	B	1	12.400.000	5	20,00%	2.480.000	0	5	0	12.400.000	12.400.000	2.480.000	2.480.000	-	-	9.920.000,00
2398	0002		Televi			APBD	2019	Buah	B	1	12.400.000	5	20,00%	2.480.000	0	5	0	12.400.000	12.400.000	2.480.000	2.480.000	-	-	9.920.000,00
2399	0003		Televi			APBD	2019	Buah	B	1	12.400.000	5	20,00%	2.480.000	0	5	0	12.400.000	12.400.000	2.480.000	2.480.000	-	-	9.920.000,00
2400	0004		Televi			APBD	2019	Buah	B	1	12.400.000	5	20,00%	2.480.000	0	5	0	12.400.000	12.400.000	2.480.000	2.480.000	-	-	9.920.000,00
2401	0001		Kuklas Rumah/Jabatan Pimpnan			APBD	2019	Buah	B	1	9.950.000	5	20,00%	1.990.000	0	5	0	9.950.000	9.950.000	1.990.000	1.990.000	-	-	7.960.000,00
2402	0002		Kuklas Rumah/Jabatan Pimpnan			APBD	2019	Buah	B	1	9.950.000	5	20,00%	1.990.000	0	5	0	9.950.000	9.950.000	1.990.000	1.990.000	-	-	7.960.000,00
2403	0003		Kuklas Rumah/Jabatan Pimpnan			APBD	2019	Buah	B	1	9.950.000	5	20,00%	1.990.000	0	5	0	9.950.000	9.950.000	1.990.000	1.990.000	-	-	7.960.000,00
2404	0004		Kuklas Rumah/Jabatan Pimpnan			APBD	2019	Buah	B	1	9.950.000	5	20,00%	1.990.000	0	5	0	9.950.000	9.950.000	1.990.000	1.990.000	-	-	7.960.000,00
2405	0001		Rak Piring			APBD	2019	Buah	B	1	7.450.000	5	20,00%	1.490.000	0	5	0	7.450.000	7.450.000	1.490.000	1.490.000	-	-	5.960.000,00
2406	0002		Rak Piring			APBD	2019	Buah	B	1	7.450.000	5	20,00%	1.490.000	0	5	0	7.450.000	7.450.000	1.490.000	1.490.000	-	-	5.960.000,00
2407	0003		Rak Piring			APBD	2019	Buah	B	1	7.450.000	5	20,00%	1.490.000	0	5	0	7.450.000	7.450.000	1.490.000	1.490.000	-	-	5.960.000,00
2408	0004		Rak Piring			APBD	2019	Buah	B	1	7.450.000	5	20,00%	1.490.000	0	5	0	7.450.000	7.450.000	1.490.000	1.490.000	-	-	5.960.000,00
2409	0001		Lampu Has			APBD	2019	Buah	B	1	3.975.000	5	20,00%	795.000	0	5	0	3.975.000	3.975.000	795.000	795.000	-	-	3.180.000,00
2410	0002		Lampu Has			APBD	2019	Buah	B	1	3.975.000	5	20,00%	795.000	0	5	0	3.975.000	3.975.000	795.000	795.000	-	-	3.180.000,00
2411	0003		Lampu Has			APBD	2019	Buah	B	1	3.975.000	5	20,00%	795.000	0	5	0	3.975.000	3.975.000	795.000	795.000	-	-	3.180.000,00
2412	0004		Lampu Has			APBD	2019	Buah	B	1	3.975.000	5	20,00%	795.000	0	5	0	3.975.000	3.975.000	795.000	795.000	-	-	3.180.000,00
2413	0001		Lampu Has			APBD	2019	Buah	B	1	3.975.000	5	20,00%	795.000	0	5	0	3.975.000	3.975.000	795.000	795.000	-	-	3.180.000,00
2414	0002		Lampu Has			APBD	2019	Buah	B	1	3.975.000	5	20,00%	795.000	0	5	0	3.975.000	3.975.000	795.000	795.000	-	-	3.180.000,00
2415	0003		Lampu Has			APBD	2019	Buah	B	1	3.975.000	5	20,00%	795.000	0	5	0	3.975.000	3.975.000	795.000	795.000	-	-	3.180.000,00
2416	0004		Lampu Has			APBD	2019	Buah	B	1	3.975.000	5	20,00%	795.000	0	5	0	3.975.000	3.975.000	795.000	795.000	-	-	3.180.000,00
2417	0001		LemariRak anasrak buku			APBD	2019	Buah	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	0	5	0	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000	-	-	3.200.000,00
2418	0002		Keper			APBD	2019	Buah	B	1	16.000.000	5	20,00%	3.200.000	0	5	0	16.000.000	16.000.000	3.200.000	3.200.000	-	-	12.800.000,00
2419	0001		Almar/Rak Anasp/Rak Buku untuk 4 Ruang			APBD	2019	Buah	B	1	10.000.000	5	20,00%	2.000.000	0	5	0	10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	8.000.000,00
2420	0002		Almar/Rak Anasp/Rak Buku untuk 4 Ruang			APBD	2019	Buah	B	1	10.000.000	5	20,00%	2.000.000	0	5	0	10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	8.000.000,00
2421	0003		Almar/Rak Anasp/Rak Buku untuk 4 Ruang			APBD	2019	Buah	B	1	10.000.000	5	20,00%	2.000.000	0	5	0	10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	8.000.000,00
2422	0004		Almar/Rak Anasp/Rak Buku untuk 4 Ruang			APBD	2019	Buah	B	1	10.000.000	5	20,00%	2.000.000	0	5	0	10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	8.000.000,00
2423	0005		Almar/Rak Anasp/Rak Buku untuk 4 Ruang			APBD	2019	Buah	B	1	10.000.000	5	20,00%	2.000.000	0	5	0	10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	8.000.000,00
2424	0006		Almar/Rak Anasp/Rak Buku untuk 4 Ruang			APBD	2019	Buah	B	1	10.000.000	5	20,00%	2.000.000	0	5	0	10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	8.000.000,00
2425	0007		Almar/Rak Anasp/Rak Buku untuk 4 Ruang			APBD	2019	Buah	B	1	10.000.000	5	20,00%	2.000.000	0	5	0	10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	8.000.000,00
2426	0008		Almar/Rak Anasp/Rak Buku untuk 4 Ruang			APBD	2019	Buah	B	1	10.000.000	5	20,00%	2.000.000	0	5	0	10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	8.000.000,00
2427	0001		Almar/Rak Anasp/Rak Buku 3 Pintu			APBD	2019	Buah	B	1	14.967.500	5	20,00%	2.993.500	0	5	0	14.967.500	14.967.500	2.993.500	2.993.500	-	-	11.974.000,00
2428	0002		Almar/Rak Anasp/Rak Buku 3 Pintu			APBD	2019	Buah	B	1	14.967.500	5	20,00%	2.993.500	0	5	0	14.967.500	14.967.500	2.993.500	2.993.500	-	-	11.974.000,00
2429	0003		Almar/Rak Anasp/Rak Buku 3 Pintu			APBD	2019	Buah	B	1	14.967.500	5	20,00%	2.993.500	0	5	0	14.967.500	14.967.500	2.993.500	2.993.500	-	-	11.974.000,00
2430	0004		Almar/Rak Anasp/Rak Buku 3 Pintu			APBD	2019	Buah	B	1	14.967.500	5	20,00%	2.993.500	0	5	0	14.967.500	14.967.500	2.993.500	2.993.500	-	-	11.974.000,00
2431	0001		Almar/Rak Anasp/Rak Buku Rak TV Olympic			APBD	2019	Buah	B	1	15.000.000	5	20,00%	3.000.000	0	5	0	15.000.000	15.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	12.000.000,00
2432	0002		Almar/Rak Anasp/Rak Buku Rak TV Olympic			APBD	2019	Buah	B	1	15.000.000	5	20,00%	3.000.000	0	5	0	15.000.000	15.000.000	3.000.000	3.0			

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				Per 31 Desember 2019										Per 31 Maret 2020								
NO. Urut.	Kode Barang	Reg.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No.Sertifikat M. Pal / No.Chassis/Mesin	Asal/Cara Barang	Tahun Pel.	Sat.	Kondisi	Jumlah awal	Masa manfaat ekonomis	Pembelian Per Tahun	Kumulatif Per Tahun	Saldo Per Tahun	Saldo Akumulatif yang sudah ditulai	Per 31 Desember 2019	Per 31 Maret 2020	Saldo	Saldo	Mutasi Berambah	Mutasi Berkurang	Nilai Buku		
																							Per 31 Desember 2019	Per 31 Maret 2020
2477	0003		Kursi Makan (Rujab)			APBD	2019	Buah	B	1	11.325.000	5	20,00%	2.465.000	0	5	0	12.325.000	12.325.000	2.465.000	2.465.000	-	-	9.860.000,00
2478	0004		Kursi Makan (Rujab)			APBD	2019	Buah	B	1	12.325.000	5	20,00%	2.465.000	0	5	0	12.325.000	12.325.000	2.465.000	2.465.000	-	-	9.860.000,00
2479	0001		Tempat Tidur Utama (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	14.990.000	5	20,00%	2.998.000	0	5	0	14.990.000	14.990.000	2.998.000	2.998.000	-	-	11.992.000,00
2480	0002		Tempat Tidur Utama (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	14.990.000	5	20,00%	2.998.000	0	5	0	14.990.000	14.990.000	2.998.000	2.998.000	-	-	11.992.000,00
2481	0003		Tempat Tidur Utama (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	14.990.000	5	20,00%	2.998.000	0	5	0	14.990.000	14.990.000	2.998.000	2.998.000	-	-	11.992.000,00
2482	0004		Tempat Tidur Utama (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	14.990.000	5	20,00%	2.998.000	0	5	0	14.990.000	14.990.000	2.998.000	2.998.000	-	-	11.992.000,00
2483	0001		Tempat Tidur (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	11.495.000	5	20,00%	2.299.000	0	5	0	11.495.000	11.495.000	2.299.000	2.299.000	-	-	9.196.000,00
2484	0002		Tempat Tidur (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	11.495.000	5	20,00%	2.299.000	0	5	0	11.495.000	11.495.000	2.299.000	2.299.000	-	-	9.196.000,00
2485	0003		Tempat Tidur (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	11.495.000	5	20,00%	2.299.000	0	5	0	11.495.000	11.495.000	2.299.000	2.299.000	-	-	9.196.000,00
2486	0004		Tempat Tidur (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	11.495.000	5	20,00%	2.299.000	0	5	0	11.495.000	11.495.000	2.299.000	2.299.000	-	-	9.196.000,00
2487	0005		Tempat Tidur (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	11.495.000	5	20,00%	2.299.000	0	5	0	11.495.000	11.495.000	2.299.000	2.299.000	-	-	9.196.000,00
2488	0006		Tempat Tidur (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	11.495.000	5	20,00%	2.299.000	0	5	0	11.495.000	11.495.000	2.299.000	2.299.000	-	-	9.196.000,00
2489	0007		Tempat Tidur (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	11.495.000	5	20,00%	2.299.000	0	5	0	11.495.000	11.495.000	2.299.000	2.299.000	-	-	9.196.000,00
2490	0008		Tempat Tidur (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	11.495.000	5	20,00%	2.299.000	0	5	0	11.495.000	11.495.000	2.299.000	2.299.000	-	-	9.196.000,00
2491	0009		Tempat Tidur (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	11.495.000	5	20,00%	2.299.000	0	5	0	11.495.000	11.495.000	2.299.000	2.299.000	-	-	9.196.000,00
2492	0010		Tempat Tidur (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	11.495.000	5	20,00%	2.299.000	0	5	0	11.495.000	11.495.000	2.299.000	2.299.000	-	-	9.196.000,00
2493	0011		Tempat Tidur (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	11.495.000	5	20,00%	2.299.000	0	5	0	11.495.000	11.495.000	2.299.000	2.299.000	-	-	9.196.000,00
2494	0012		Tempat Tidur (Olympic)			APBD	2019	Buah	B	1	11.495.000	5	20,00%	2.299.000	0	5	0	11.495.000	11.495.000	2.299.000	2.299.000	-	-	9.196.000,00
2495	0001		Sofa			APBD	2019	Buah	B	1	24.970.000	5	20,00%	4.994.000	0	5	0	24.970.000	24.970.000	4.994.000	4.994.000	-	-	19.976.000,00
2496	0002		Sofa			APBD	2019	Buah	B	1	24.970.000	5	20,00%	4.994.000	0	5	0	24.970.000	24.970.000	4.994.000	4.994.000	-	-	19.976.000,00
2497	0003		Sofa			APBD	2019	Buah	B	1	24.970.000	5	20,00%	4.994.000	0	5	0	24.970.000	24.970.000	4.994.000	4.994.000	-	-	19.976.000,00
2498	0004		Sofa			APBD	2019	Buah	B	1	24.970.000	5	20,00%	4.994.000	0	5	0	24.970.000	24.970.000	4.994.000	4.994.000	-	-	19.976.000,00
2499	0001		Kursi Tamu (Laki Jepang)	Lokal Jati Jepang		APBD	2019	Buah	B	1	14.900.000	5	20,00%	2.980.000	0	5	0	14.900.000	14.900.000	2.980.000	2.980.000	-	-	11.920.000,00
2500	0002		Kursi Tamu (Laki Jepang)	Lokal Jati Jepang		APBD	2019	Buah	B	1	14.900.000	5	20,00%	2.980.000	0	5	0	14.900.000	14.900.000	2.980.000	2.980.000	-	-	11.920.000,00
2501	0003		Kursi Tamu (Laki Jepang)	Lokal Jati Jepang		APBD	2019	Buah	B	1	14.900.000	5	20,00%	2.980.000	0	5	0	14.900.000	14.900.000	2.980.000	2.980.000	-	-	11.920.000,00
2502	0004		Kursi Tamu (Laki Jepang)	Lokal Jati Jepang		APBD	2019	Buah	B	1	14.900.000	5	20,00%	2.980.000	0	5	0	14.900.000	14.900.000	2.980.000	2.980.000	-	-	11.920.000,00
2503	0005		Dispenser (Polytron) Rujab	Polytron		APBD	2019	Buah	B	1	2.000.000	5	20,00%	400.000	0	5	0	2.000.000	2.000.000	400.000	400.000	-	-	1.600.000,00
2504	0006		Dispenser (Polytron) Rujab	Polytron		APBD	2019	Buah	B	1	2.000.000	5	20,00%	400.000	0	5	0	2.000.000	2.000.000	400.000	400.000	-	-	1.600.000,00
2505	0007		Dispenser (Polytron) Rujab	Polytron		APBD	2019	Buah	B	1	2.000.000	5	20,00%	400.000	0	5	0	2.000.000	2.000.000	400.000	400.000	-	-	1.600.000,00
2506	0008		Dispenser (Polytron) Rujab	Polytron		APBD	2019	Buah	B	1	2.000.000	5	20,00%	400.000	0	5	0	2.000.000	2.000.000	400.000	400.000	-	-	1.600.000,00
2507	0009		Mesin Cuci (Samsung)	Samsung		APBD	2019	Buah	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	0	5	0	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000	-	-	3.200.000,00
2508	0002		Mesin Cuci (Samsung)	Samsung		APBD	2019	Buah	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	0	5	0	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000	-	-	3.200.000,00
2509	0003		Mesin Cuci (Samsung)	Samsung		APBD	2019	Buah	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	0	5	0	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000	-	-	3.200.000,00
2510	0004		Mesin Cuci (Samsung)	Samsung		APBD	2019	Buah	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	0	5	0	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000	-	-	3.200.000,00
2511	0001		Jam Dinding (RANAKA)	Ranaka		APBD	2019	Buah	B	1	1.425.000	5	20,00%	285.000	0	5	0	1.425.000	1.425.000	285.000	285.000	-	-	1.140.000,00
2512	0002		Jam Dinding (RANAKA)	Ranaka		APBD	2019	Buah	B	1	1.425.000	5	20,00%	285.000	0	5	0	1.425.000	1.425.000	285.000	285.000	-	-	1.140.000,00
2513	0003		Jam Dinding (RANAKA)	Ranaka		APBD	2019	Buah	B	1	1.425.000	5	20,00%	285.000	0	5	0	1.425.000	1.425.000	285.000	285.000	-	-	1.140.000,00
2514	0004		Jam Dinding (RANAKA)	Ranaka		APBD	2019	Buah	B	1	1.425.000	5	20,00%	285.000	0	5	0	1.425.000	1.425.000	285.000	285.000	-	-	1.140.000,00
2515	0001		Mesa Hias Olympic	Olympic		APBD	2019	Buah	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	0	5	0	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000	-	-	3.200.000,00
2516	0002		Mesa Hias Olympic	Olympic		APBD	2019	Buah	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	0	5	0	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000	-	-	3.200.000,00
2517	0003		Mesa Hias Olympic	Olympic		APBD	2019	Buah	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	0	5	0	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000	-	-	3.200.000,00
2518	0004		Mesa Hias Olympic	Olympic		APBD	2019	Buah	B	1	4.000.000	5	20,00%	800.000	0	5	0	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000	-	-	3.200.000,00
2519	0001		Mesa Kamar Tidur			APBD	2019	Buah	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	0	5	0	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000	-	-	2.000.000,00
2520	0002		Mesa Kamar Tidur			APBD	2019	Buah	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	0	5	0	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000	-	-	2.000.000,00
2521	0003		Mesa Kamar Tidur			APBD	2019	Buah	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	0	5	0	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000	-	-	2.000.000,00
2522	0004		Mesa Kamar Tidur			APBD	2019	Buah	B	1	2.500.000	5	20,00%	500.000	0	5	0	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000	-	-	2.000.000,00
2523	0001		Kursi Ruang Tidur			APBD	2019	Buah	B	1	3.500.000	5	20,00%	700.000	0	5	0	3.500.000	3.500.000	700.000	700.000	-	-	2.800.000,00
2524	0002		Kursi Ruang Tidur			APBD	2019	Buah	B	1	3.500.000	5	20,00%	700.000	0	5	0	3.500.000	3.500.000	700.000	700.000	-	-	2.800.000,00
2525	0003		Kursi Ruang Tidur			APBD	2019	Buah	B	1	3.500.000	5	20,00%	700.000	0	5	0	3.500.000	3.500.000	700.000	700.000	-	-	2.800.000,00
2526	0004		Kursi Ruang Tidur			APBD	2019	Buah	B	1	3.500.000	5	20,00%	700.000	0	5	0	3.500.000	3.500.000	700.000	700.000	-	-	2.800.000,00
2527	0001		MesinPolong Rumpul			APBD	2019	Buah	B	1	2.000.000	5	20,00%	400.000	0	5	0	2.000.000	2.000.000	400.000	400.000	-	-	1.600.000,00
2528	0002		MesinPolong Rumpul			APBD	2019	Buah	B	1	2.000.000	5	20,00%	400.000	0	5	0	2.000.000	2.000.000	400.000	400.000	-	-	1.600.000,00
2529	0003		MesinPolong Rumpul			APBD	2019	Buah	B	1	2.000.000	5	20,00%	400.000	0	5	0	2.000.000	2.000.000	400.000	400.000	-	-	

No. Urut.	Kode Barang	Reg.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikat No. Pal / No. Chasis/Mesin	Asal/Cara Barang	Tahun Pel.	Sat.	Kondisi	Jumlah awal	Masa Kadaluwarsa Ekonos	Per 31 Desember 2019					Per 31 Maret 2020				
												Saldo	Perubahan Tahun	Saldo	Perubahan Tahun	Saldo	Perubahan Tahun	Saldo	Perubahan Tahun	Saldo	Perubahan Tahun
13.2.05.02.04.004	0003	A.C. Split (Rujab Wakel)	Panasonic	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	6.250.000,00	6.250.000,00
13.2.05.02.04.004	0004	A.C. Split (Rujab Wakel)	Panasonic	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	6.250.000,00	6.250.000,00
	0001	Lemari Kayu (Rujab Pimpinan)	man Pakaian Lokal Jaa	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
	0002	Lemari Kayu (Rujab Pimpinan)	man Pakaian Lokal Jaa	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
	0003	Lemari Kayu (Rujab Pimpinan)	man Pakaian Lokal Jaa	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
	0004	Lemari Kayu (Rujab Pimpinan)	man Pakaian Lokal Jaa	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
	0005	Lemari Kayu (Rujab Pimpinan)	man Pakaian Lokal Jaa	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
	0006	Lemari Kayu (Rujab Pimpinan)	man Pakaian Lokal Jaa	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
	0007	Lemari Kayu (Rujab Pimpinan)	man Pakaian Lokal Jaa	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
	0008	Lemari Kayu (Rujab Pimpinan)	man Pakaian Lokal Jaa	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
13.2.05.02.01.048	0001	Sofa (Rujab Pimpinan)	321	APBD	2020	Zet	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	24.750.000,00	24.750.000,00
13.2.05.02.01.048	0002	Sofa (Rujab Pimpinan)	321	APBD	2020	Zet	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	24.750.000,00	24.750.000,00
13.2.05.02.01.048	0003	Sofa (Rujab Pimpinan)	321	APBD	2020	Zet	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	24.750.000,00	24.750.000,00
13.2.05.02.01.048	0004	Sofa (Rujab Pimpinan)	321	APBD	2020	Zet	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	24.750.000,00	24.750.000,00
13.2.05.02.01.031	0001	Kursi Tamu (Rujab Pimpinan)	Lokal	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	10.225.000,00	10.225.000,00
13.2.05.02.01.031	0002	Kursi Tamu (Rujab Pimpinan)	Lokal	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	10.225.000,00	10.225.000,00
13.2.05.02.01.031	0003	Kursi Tamu (Rujab Pimpinan)	Lokal	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	10.225.000,00	10.225.000,00
13.2.05.02.04.001	0001	Lemari Es (Rujab Pimpinan)	Kulkas/Sharp	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	24.750.000,00	24.750.000,00
13.2.05.02.04.001	0002	Lemari Es (Rujab Pimpinan)	Kulkas/Sharp	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	24.750.000,00	24.750.000,00
13.2.05.02.04.001	0003	Lemari Es (Rujab Pimpinan)	Kulkas/Sharp	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	24.750.000,00	24.750.000,00
13.2.05.02.04.001	0001	Lemari Kayu (Ruang Kerja Pimpinan DPRD)	Lokal	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	8.500.000,00	8.500.000,00
	0002	Lemari Kayu (Ruang Kerja Pimpinan DPRD)	Lokal	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	8.500.000,00	8.500.000,00
	0003	Lemari Kayu (Ruang Kerja Pimpinan DPRD)	Lokal	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	8.500.000,00	8.500.000,00
	0004	Lemari Kayu (Ruang Kerja Pimpinan DPRD)	Lokal	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	8.500.000,00	8.500.000,00
13.2.05.02.06.002	0001	Tempat tidur Lengkap	Samsung	APBD	2020	Paket	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	12.500.000,00	12.500.000,00
	0001	Tirai/Gorden	-	APBD	2020	Paket	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00
	0001	Tirai/Gorden	-	APBD	2020	Paket	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00
	0001	Tirai/Gorden	-	APBD	2020	Paket	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00
	0001	Generator Listrik	Maestro	APBD	2020	Paket	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	70.000.000,00	70.000.000,00
	0001	Personal Computer	Asus	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00
	0002	Personal Computer	Asus	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00
	0003	Personal Computer	Asus	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00
	0004	Personal Computer	Asus	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00
	0005	Personal Computer	Asus	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00
	0006	Personal Computer	Asus	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00
	0007	Personal Computer	Asus	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00
	0008	Personal Computer	Asus	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00
	0009	Personal Computer	Asus	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00
	0010	Personal Computer	Asus	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00
	0001	Printer	Canon	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00
	0002	Printer	Canon	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00
	0003	Printer	Canon	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00
	0004	Printer	Canon	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00
	0005	Printer	Canon	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00
	0006	Printer	Canon	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00
	0007	Printer	Canon	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00
	0008	Printer	Canon	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00
	0009	Printer	Canon	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00
	0010	Printer	Canon	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00
	0001	Scanner	Canon	APBD	2020	Unit	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
	0001	Tempat tidur Lengkap	-	APBD	2020	Zet	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	37.497.625,00	37.497.625,00
	0002	Tempat tidur Lengkap	-	APBD	2020	Zet	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	37.497.625,00	37.497.625,00
	0003	Tempat tidur Lengkap	-	APBD	2020	Zet	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	37.497.625,00	37.497.625,00
	0004	Tempat tidur Lengkap	-	APBD	2020	Zet	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	37.497.625,00	37.497.625,00
	0001	Lemari Anasp	-	APBD	2020	Buah	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	8.500.000,00	8.500.000,00
	0002	Lemari Anasp	-	APBD	2020	Buah	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	8.500.000,00	8.500.000,00
	0003	Lemari Anasp	-	APBD	2020	Buah	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	8.500.000,00	8.500.000,00
	0001	Peralatan/Perlengkapan Dapur	-	APBD	2020	Paket	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	25.000.000,00	25.000.000,00
	0002	Peralatan/Perlengkapan Dapur	-	APBD	2020	Paket	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	25.000.000,00	25.000.000,00
	0003	Peralatan/Perlengkapan Dapur	-	APBD	2020	Paket	B	1	5	20,00%	-	0	5	0	0	0	0	0	0	25.000.000,00	25

No. Urut	Kode Barang	Reg.	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikat	Asal/Cara	Tahun	Sat.	Kondisi	Jumlah awal	Masa Berlaku	Perkiraan Nilai	Per 31 Desember 2019				Per 31 Maret 2020			
													Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Berambah	Berkurang	Nilai Buku	
14	05.17.01.01.10	0010	Buku-Buku Perpustakaan	-	-	APBD	2011	Buah	-	1	390.000	0	390.000	390.000	0	0	0	390.000,00		
15	0001	Buku-bacaan dan peraturan	-	-	APBD	2014	Paket	-	1	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	0	0	0	8.500.000,00			
16	0001	Buku peraturan perundang-undangan	-	-	APBD	2016	Paket	-	0	5.350.000	0	5.350.000	5.350.000	0	0	0	5.350.000,00			
17	05.17.01.01.10	0001	Buku-Buku Perpustakaan	-	-	APBD	2012	Paket	-	1	14.800.000	0	14.800.000	14.800.000	0	0	0	14.800.000,00		
18	0001	Buku peraturan perundang-undangan	-	-	APBD	2016	Paket	B	1	5.360.000	0	5.360.000	5.360.000	0	0	0	5.360.000,00			
19	05.17.01.01.10	0001	Buku-Buku Perpustakaan	-	-	APBD	2017	Expt	B	1	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0	175.000,00		
20	05.17.01.01.10	0002	Buku-Buku Perpustakaan	-	-	APBD	2017	Expt	B	1	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0	175.000,00		
21	05.17.01.01.10	0003	Buku-Buku Perpustakaan	-	-	APBD	2017	Expt	B	1	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0	175.000,00		
22	05.17.01.01.10	0004	Buku-Buku Perpustakaan	-	-	APBD	2017	Expt	B	1	151.000	0	151.000	151.000	0	0	0	151.000,00		
23	05.17.01.01.10	0005	Buku-Buku Perpustakaan	-	-	APBD	2017	Expt	B	1	151.000	0	151.000	151.000	0	0	0	151.000,00		
24	05.17.01.01.10	0006	Buku-Buku Perpustakaan	-	-	APBD	2017	Expt	B	1	151.000	0	151.000	151.000	0	0	0	151.000,00		
25	13.5.01.01.04.003	0004	Imu Politik	-	-	APBD	2017	Expt	B	1	114.000	0	114.000	114.000	0	0	0	114.000,00		
26	13.5.01.01.04.003	0005	Imu Politik	-	-	APBD	2017	Expt	B	1	114.000	0	114.000	114.000	0	0	0	114.000,00		
27	13.5.01.01.04.003	0006	Imu Politik	-	-	APBD	2017	Expt	B	1	114.000	0	114.000	114.000	0	0	0	114.000,00		
28	05.17.01.07.05	0001	Management dan Perkantoran	-	-	APBD	2017	Expt	B	1	155.000	0	155.000	155.000	0	0	0	155.000,00		
29	05.17.01.07.05	0002	Management dan Perkantoran	-	-	APBD	2017	Expt	B	1	155.000	0	155.000	155.000	0	0	0	155.000,00		
30	05.17.01.07.05	0003	Management dan Perkantoran	-	-	APBD	2017	Expt	B	1	155.000	0	155.000	155.000	0	0	0	155.000,00		
31	02.06.02.05.05	0001	Assesors kantor/Pigura	-	-	APBD	2013	Buah	B	1	1.666.600	5	20,00%	333.320	0	0	0	1.666.600,00		
32	02.06.02.05.05	0002	Assesors kantor/Pigura	-	-	APBD	2013	Buah	B	1	1.666.600	5	20,00%	333.320	0	0	0	1.666.600,00		
33	02.06.02.05.05	0003	Assesors kantor/Pigura	-	-	APBD	2013	Buah	B	1	1.666.600	5	20,00%	333.320	0	0	0	1.666.600,00		
34	02.06.02.05.05	0004	Assesors kantor/Pigura	-	-	APBD	2013	Buah	B	1	1.666.600	5	20,00%	333.320	0	0	0	1.666.600,00		
35	02.06.02.05.05	0005	Assesors kantor/Pigura	-	-	APBD	2013	Buah	B	1	1.667.000	5	20,00%	333.400	0	0	0	1.667.000,00		
36	02.06.02.05.05	0001	Assesors kantor/Pigura	-	-	APBD	2013	Buah	B	1	1.666.600	5	20,00%	333.320	0	0	0	1.666.600,00		
37	02.06.02.05.05	0001	Buku Hukum Keuangan Negara	-	-	APBD	2018	Expt	B	1	169.000,00	0	169.000,00	169.000,00	0	0	0	169.000,00		
38	0002	Buku Hukum Keuangan Negara	-	-	APBD	2018	Expt	B	1	169.000,00	0	169.000,00	169.000,00	0	0	0	169.000,00			
39	0001	Buku Himp. Per UU RI No.23 Tahun 2014 t	-	-	APBD	2018	Expt	B	1	169.000,00	0	169.000,00	169.000,00	0	0	0	169.000,00			
40	0002	Buku Himp. Per UU RI No.23 Tahun 2014 t	-	-	APBD	2018	Expt	B	1	169.000,00	0	169.000,00	169.000,00	0	0	0	169.000,00			
41	0001	Buku UU Pemilu 2019	-	-	APBD	2018	Expt	B	1	114.000,00	0	114.000,00	114.000,00	0	0	0	114.000,00			
42	0002	Buku UU Pemilu 2019	-	-	APBD	2018	Expt	B	1	114.000,00	0	114.000,00	114.000,00	0	0	0	114.000,00			
43	13.5.01.01.04.003	0001	Buku Ilmu Politik	-	-	APBD	2018	Expt	B	1	114.000,00	0	114.000,00	114.000,00	0	0	0	114.000,00		
44	13.5.01.01.04.003	0002	Buku Ilmu Politik	-	-	APBD	2018	Expt	B	1	114.000,00	0	114.000,00	114.000,00	0	0	0	114.000,00		
45	0001	Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Terb	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000,00			
46	0002	Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Terb	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000,00			
47	0001	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000,00			
48	0001	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000,00			
49	0002	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000,00			
50	0003	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000,00			
51	0004	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000,00			
52	0001	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	145.000,00			
53	0002	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	145.000,00			
54	0003	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	145.000,00			
55	0004	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	145.000,00			
56	0001	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000,00			
57	0002	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000,00			
58	0003	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000,00			
59	0004	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000,00			
60	0001	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 d	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000,00			
61	0002	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 d	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000,00			
62	0003	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 d	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000,00			
63	0004	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 d	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000,00			
64	0005	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 d	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000,00			
65	0001	Matia Bank Dunia dan IMF	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000,00			
66	0002	Matia Bank Dunia dan IMF	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000,00			
67	0003	Matia Bank Dunia dan IMF	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000,00			
68	0004	Matia Bank Dunia dan IMF	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000,00			
69	0001	Analisis Laporan Keuangan	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000,00			
70	0002	Analisis Laporan Keuangan	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000,00			
71	0001	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	154.000	0	154.000	154.000	0	0	0	154.000,00			
72	0002	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	154.000	0	154.000	154.000	0	0	0	154.000,00			
73	0001	Undang-Undang Desa Nomor 22 Tahun 20	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00			
74	0002	Undang-Undang Desa Nomor 22 Tahun 20	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00			
75	0001	Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00			
76	0002	Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00			
77	0003	Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00			
78	0004	Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000,00			
79	0001	Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2	-	-	APBD	2019	Expt	B	1	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000,00			
80																				